

Relasi Politik dan Agama di Indonesia

Perspektif Nurcholish Madjid

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Sejarah Peradaban Islam



Oleh

Nurul Jannah

NIM. 20.2.33.008

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1446 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Jannah

NIM : 20233008

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Institut : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 20 Mei 2025

Yang bertandatangan di bawah ini



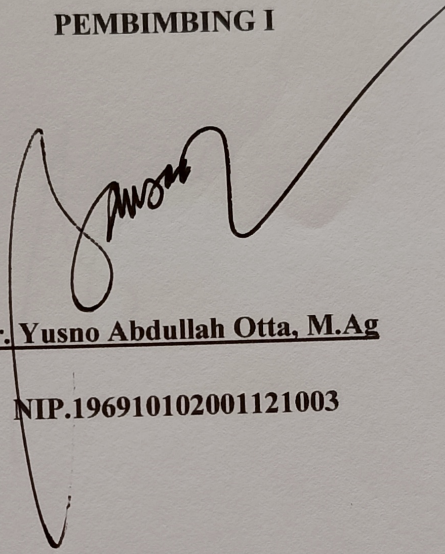
Nurul Jannah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Relasi Politik dan Agama di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*” yang ditulis oleh Nurul Jannah, telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2025

Oleh:

PEMBIMBING I

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Yusno Abdullah Otta, is written over the printed name and NIP.

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

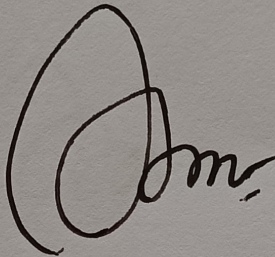
NIP.196910102001121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Relasi Politik dan Agama di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*” yang ditulis oleh Nurul Jannah, telah disetujui pada tanggal
20 Mei 2025

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive 'm' and a small horizontal stroke.

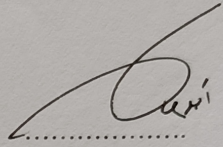
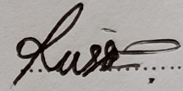
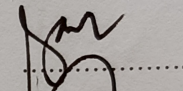
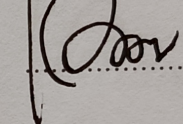
Muhammad Bakti Khudari Lantong, M.S.I

NIP.197309302009121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

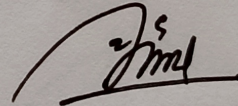
Skripsi berjudul “Relasi Politik dan Agama di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid” yang ditulis oleh Nurul Jannah ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 05 Juni 2025.

Tim Penguji:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1. Ali Amin, Ph.D | (Ketua Penguji) |  |
| 2. Rusdiyanto, M.Hum | (Sekretaris Penguji) |  |
| 3. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag | (Pembimbing 1/Penguji) |  |
| 4. Muhammad Bekti K. Lantong, M.S.I | (Pembimbing 2/Penguji) |  |

Manado, 10 Juni 2025

Dekan FUAD



Dr. Sahari, M.Pd.I
NIP. 197212312000031009

ABSTRACT

Name: Nurul Jannah

NIM: 20233008

Study Program: Islamic Civilization History

Fakulty: Ushuluddin Adab and Da'wah

Thesis Title: Politics and Religion in Indonesia: An Analysis through the Perspective of Nurcholish Madjid

The relationship between politics and religion in Indonesian history has shown fluctuating dynamics, depending on the socio-political conditions of each era. During the New Order era, this relationship experienced various tensions influenced by internal and external factors. This issue has attracted the attention of one of Indonesia's prominent Muslim intellectuals, Nurcholish Madjid (Cak Nur), who contributed his thoughts on the relationship between politics and religion in Indonesia. This research aims to analyze Cak Nur's views on the relationship between politics and religion in Indonesia during the New Order era and examine his ideas on the concept of an Islamic state. The method used is a literature study combined with a historical approach, which includes four stages: heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this research show that Cak Nur's thoughts on politics and religion developed according to the context of the times. As an intellectual who actively responded to socio-political dynamics, Cak Nur saw that the tension between religion and politics during the New Order era was triggered by internal dynamics within the government and among Muslims themselves. The conclusion of this research is that the relationship between religion and politics during the New Order era in Cak Nur's view shows a complex love-hate relationship pattern and is related to the concept of an Islamic state. Cak Nur supports Amien Rais's view that the Prophet Muhammad SAW did not leave a formal Islamic state model, but rather substantive Islamic values that are reflected in Pancasila as the foundation of the Indonesian state.

Keywords: Nurcholish Madjid, Religion and Politics, New Order, Islamic State, Pancasila.

ABSTRAK

Nama : Nurul Jannah

NIM : 20233008

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Relasi Politik dan Agama di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid

Relasi antara politik dan agama dalam sejarah Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif, tergantung pada kondisi sosial-politik di setiap zamannya. Pada era Orde baru, hubungan tersebut mengalami berbagai ketegangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Persoalan ini menjadi perhatian salah satu intelektual Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang turut memberikan kontribusi pemikirannya mengenai relasi politik dan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Cak Nur terkait hubungan antara politik dan agama di Indonesia pada masa Orde baru serta menelaah gagasannya mengenai konsep negara Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang dipadukan dengan pendekatan historis, meliputi empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Cak Nur mengenai politik dan agama berkembang sesuai dengan konteks zaman. Sebagai intelektual yang aktif merespon dinamika sosial-politik, Cak Nur melihat bahwa ketegangan antara agama dan politik pada era Orde baru dipicu oleh dinamika internal dalam tubuh pemerintahan maupun di kalangan Islam sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan agama dan politik pada era Orde baru dalam pandangan Cak Nur menunjukan pola *love-hate relationship* yang kompleks dan terkait konsep negara Islam, Cak Nur mendukung pandangan Amien Rais bahwa Nabi Muhammad saw tidak mewariskan bentuk negara Islam secara formal, melainkan nilai-nilai Islam substantif yang menurutnya telah tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Kata Kunci: Nurcholish Madjid, Agama dan Politik, Orde Baru, Negara Islam, Pancasila.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan rasa syukur senantiasa tercurah ke hadirat Allah swt, penguasa semesta dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Dikarenakan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Shalawat nan agung tiada henti selalu mengudara kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Saw. Semoga syafaatnya senantiasa menaungi seluruh makhluk di muka bumi ini.

Dalam penelitian ini, begitu banyak rupa perjalanan yang dihadapi oleh penulis, sukar atau mudah, pun macam-macam rintangan yang mewarnai proses dalam upaya penyelesaian skripsi ini. Tentunya rintangan yang ada tidaklah menjadi batu hambatan dalam penelitian ini. Sebaliknya rintangan datang untuk dihadapi. Sementara, *sesuatu yang sudah dimulai, harus diselesaikan dengan cara terbaik versi masing-masing*. Jadi penulis memilih untuk tidak lari dari penelitian ini, dan menyelesaikannya dengan versi terbaik sesuai kemampuan dari diri sendiri. Rampungnya penelitian ini, selain atas berkat diri sendiri yang gigih untuk terus konsisten, dan *tentu saja* atas berkat rahmat Allah swt, namun ada juga pengaruh, dorongan, bantuan serta doa dari banyak orang yang ada di sekitar penulis. Seperti kalimat paling ikonik yang ada dalam salah satu buku Paulo Coelho yang berjudul *The Alchemist*. Kalimatnya berbunyi begini, “*Kalau engkau mendambakan sesuatu, alam semesta bekerja sama membantumu memperolehnya*”. Sebab itulah, karena keinginan besar penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini, seluruh semesta termasuk orang-orang yang ada di sekitar pun turut andil dalam membantu proses ini.

Maka dari itu, penulis ingin memberikan apresiasi yang tinggi pun ucapan terima kasih yang sederhana namun bermakna, kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado.
2. Dr. Sahari, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
3. Rusdiyanto, M.Hum selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Bkti Lantong, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan rendah hati dalam membantu serta membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keduanya senantiasa diberkahi dan dilindungi Allah swt.
5. Ali Amin, Ph.D selaku Dosen Penguji I dan Rusdiyanto, M.Hum selaku Dosen Penguji II yang turut memberikan kritikan dan saran segar yang membangun dan mencerahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga keduanya senantiasa diberkahi dan dilindungi Allah swt.
6. Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado, terkhususnya Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang sangat produktif dalam menyalurkan ilmu yang bermanfaat selama awal masa perkuliahan hingga di titik ini.
7. Cinta pertama di muka bumi, Ibu Siti Rahmawati Yakobus, mama yang penuh doa dan kasih, yang senantiasa menaruh harapan besar disetiap langkah yang diambil oleh penulis. Kakak-kakak yang selalu mendukung penuh apapun yang dipilih oleh adik perempuan mereka, serta si bungsu yang berperan sebagai penyalur tawa di rumah. Allah swt senantiasa menjaga kalian semua.
8. Seluruh teman-teman penulis, yang selalu berbagi manfaat di sela waktu, terkhususnya semua kawan SPI Angkatan 2021. Berkembanglah dan berbahagialah.
9. *Last but not least*, semua pihak yang membantu dalam hal sumbangsih saran, kritik, tempat menampung resah, pemberi bantuan materi dan hal-hal sederhana

yang begitu bermakna dalam proses penyusunan skripsi ini. Allah swt turut bersama kalian semua.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa skripsi ini terlepas dari kata sempurna. Meskipun begitu, sebisa mungkin penulis menyajikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya, dibarengi dengan sumber dan data yang valid dan sudah melalui proses yang cukup panjang. Penelitian ini dibuka selebar-lebarnya untuk kritik dan saran yang berperan penting dalam membangun dan membentuk penelitian ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga karya ini bisa bermanfaat serta menjadi inspirasi kepada kita semua terkhususnya dalam dunia akademik. Terima kasih.

MOTO

“Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memang harus kita alami, untuk menuntun kita kembali ke jalur sejati Legenda Pribadi kita. Ada juga peristiwa-peristiwa lain yang mesti terjadi agar kita bisa mempraktekkan segala sesuatu yang telah kita pelajari. Dan akhirnya, ada hal-hal yang terjadi agar kita bisa menarik pelajaran darinya.”

Paulo Coelho dalam bukunya *The Fifth Mountain*

-

“Education never ends, Watson. It is a series of lessons,
with the greatest for the last.”

-Sherlock Holmes-

Sir Arthur Conan Doyle

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
MOTO	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Konseptual (<i>Conceptual Framework</i>).....	13
H. Metode Penelitian.....	17
BAB II	19
BIOGRAFI SINGKAT NURCHOLISH MADJID	19
A. Latar Belakang Nurcholish Madjid	19
B. Karya-karya dan Khasanah Pemikiran Cak Nur.....	24
C. Transformasi Pemikiran Cak Nur	27
BAB III	36
RELASI AGAMA DAN POLITIK	36
A. Relasi Agama dan Politik Secara Umum	36
B. Relasi Politik dan Agama di Indonesia	41
BAB IV	58
NURCHOLISH MADJID DAN RELASI POLITIK - AGAMA DI INDONESIA (ERA ORDE BARU)	58

A. Politik dan Agama dalam Kacamata Nurcholish Madjid.....	58
B. Relasi Politik dan Agama di Indonesia (Era Orde Baru) dalam Kacamata Cak Nur.....	63
C. Konsep Negara Islam Menurut Nurcholish Madjid.....	69
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara politik dan agama merupakan suatu perbincangan yang tak akan pernah berkesudahan. Kedua konsep ini memiliki ciri khas masing-masing yang pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang bertolakbelakang layaknya ketika mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama. Sejatinya kita memahami agama selaku bentuk yang sakral atau menurut Bouquet agama merupakan hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia yang bersifat suci, supranatural dan ada dengan sendirinya, pun memiliki kekuasaan absolut yang disebut sebagai Tuhan.¹ Adapun definisi agama menurut James Martineau adalah kepercayaan tentang Tuhan yang abadi, yaitu tentang Jiwa dan Kemauan Ilahi yang mengatur alam eaya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia.²

Pernyataan-pernyataan ini menampilkan kepada kita bahwa agama diakui sebagai sesuatu yang mulia dan jauh dari persoalan yang menurut tolak ukur manusia sebagai sesuatu buruk. Sementara itu, lain lagi dengan politik. Mayoritas menilai bahwa persoalan politik selalu saja menampilkan wajah dan citra yang buruk. Semisal permainan kekuasaan, oligarki, dan seperti apa yang terjadi saat ini di Indonesia di mana politik dianggap sebagai suatu alat untuk mensejahterakan penguasa dan keluarganya serta menimbun kekayaan pribadi dibanding dengan melayani kebutuhan masyarakat luas. Kita tentu akhir-akhir

¹ Sakaria To Anwar, dkk. "Religiolitas Agama-Agama di Indonesia," *Sosioreligius* 2, no. 4 (Desember 2019) : 71.

² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987) 148.

ini begitu familiar dengan ragam istilah terkait politik di Indonesia seperti politik dinasti, politik gentong babi (seperti yang diulas oleh Bivitri Susanti) dan ragam istilah yang menggambarkan kotornya kondisi politik yang ada saat ini.³

Sekalipun kita memahami konsep agama dan politik jelas memiliki wajah yang berbeda, namun bagi William Montgomery Watt, salah seorang Orientalis sekaligus Sejarawan Barat yang banyak mengkaji terkait sejarah Islam awal dan bahkan menuliskan tentang Nabi Muhammad dalam salah satu karyanya, *Muhammad : Prophet and Stateman*, menyatakan bahwa agama sejak dahulu telah terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat pun termasuk ke dalam persoalan politik. Menurut Watt, dalam tolak ukur suatu kebenaran, sebenarnya agama tidak memiliki konsep-konsep politik bagi umatnya. Yang ada ialah suatu agama kadangkala mendukung konsep-konsep politik regional tempat asal agama tersebut. Dalam sejarah Islam sendiri, Watt memaparkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad berdasarkan fakta sejarah dan bahkan dijelaskan dalam al-Qur'an sendiri ialah untuk memberi peringatan kepada umat manusia terkait sikap-sikap seperti kikir, sombong dan segala perilaku yang merusak akan mengarahkan manusia itu kepada malapetaka dan bencana. Dalam menjalankan misi keagamaan ini, Watt berpendapat bahwa perlu adanya pendekatan politis dan pendekatan inilah yang kemudian dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah.⁴

Pandangan Watt bukan hanya satu-satunya pandangan yang mengatakan bahwa agama melebur bahkan dalam konsep politik sekalipun. Ada berbagai peneliti yang juga mengakui bahwa agama dan politik atau politik dan agama

³ Muchsin Al-Fikri et al., "Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik," *Buana Komunikasi : Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (n.d.)160.

⁴ William Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Beunebi Cipta, 1987)33-35.

memiliki hubungan yang saling interdependensi.⁵ Hal ini dikarenakan antara kedua konsep itu memiliki beberapa sisi, misi serta tujuan yang sama. Bahkan jika ditilik dari watak intrinsik ataupun realitas politik, agama berperan sebagai variable penting dan harus diintegrasikan ke dalam proyek *sustainable development* atau sebuah pengembangan yang berkelanjutan.⁶

Di Indonesia sendiri, topik terkait relasi agama dan politik cukup banyak dibahas di mana-mana, apalagi Indonesia ialah salah satu negara yang diidentikkan sebagai negara mayoritas muslim yang berarti tidak sedikit muncul pergerakan yang membawa ideologi-ideologi yang menjurus pada konsep pendirian negara Islam. Di mana konsep tersebut berusaha atau setidaknya tidaknya memaksa untuk memadupadankan dan menjadikan agama sebagai dasar dari perpolitikan atau dasar hukum dalam suatu negara. Dalam sejarah Indonesia banyak sekali peristiwa yang bisa kita temui terkait hal ini misalnya saja, dalam sejarah pembentukan dasar negara oleh para pendiri yang diwakili oleh tiap tokoh dari berbagai wilayah di Indonesia, dirumuskanlah suatu konsep yang disebut sebagai Piagam Jakarta dengan sila pertama yang berbunyi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Namun, tujuh kata yang tertuang dalam sila pertama kemudian disepakati untuk dihapus.⁷

Hal ini didasari oleh sikap keberatan dari beberapa pihak yang mewakili Protestan dan Katolik di mana mereka merasa bahwa kalimat itu jelas tidak mengikat pihak mereka dan hanya tertuju kepada kalangan umat Islam saja. Bagi mereka, dituangkannya tujuh kata tersebut dalam pokok undang-undang yang akan menjadi dasar serta pandangan kehidupan berbangsa bernegara, menandakan adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan jika

⁵ Adang Sonjaya, Budi Rahayu Diningrat. “Relasi Agama Dan Politik Di Indonesia,” *Jurnal CIC Lembaga Dan Konsultasi Sosial* 5, no. 1 (2023): 25.

⁶ Mun'im Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi*, 1st ed. (Bekasi: Gugus Press, 2002) 71.

⁷ M. Abduh Wahid, “Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia,” *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 147.

itu sampai disahkan, maka pihak mereka lebih baik memilih untuk berdiri di luar Republik saja.⁸ Pada saat itu, meski umat Islam menerima dan bersepakat dengan keputusan tersebut, namun tak bisa dipungkiri bahwa ada sebuah perasaan kalah, gagal atau di *anak tiri* kan dalam hal perpolitikan di tanah sendiri. Meski tujuh kata tersebut sudah disepakati oleh para *founding father* untuk dihapus, namun dalam beberapa waktu ke depan terus diperbincangkan dan diperdebatkan bahkan muncul isu-isu untuk memasukkan kembali tujuh kata tersebut ke dalam Pancasila yang telah disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Memori peristiwa sejarah ini terus membayangi pemeluk agama terbanyak di Indonesia sampai detik ini, sehingga dalam perjalanan sejarah, dari kalangan umat muslim senantiasa berusaha untuk muncul kepermukaan politik dan mengusahakan agar bisa bereksistensi dalam pemerintahan di Indonesia. Bukan hanya bereksistensi dalam politik, namun lahir juga beberapa pergerakan yang berupaya untuk mengesahkan ideologi Islam sebagai ideologi sah negara dengan berlandaskan pada syariat dan hukum Islam.

Usaha yang cukup keliru ini tergambarkan dalam sejarah yaitu pada masa orde lama sekitar tahun 1948, muncul pergerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo selaku imam. Pergerakan ini mengusung ideologi Islam yang diinginkan menjadi ideologi negara dalam artian ingin memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII). Pengaruh pergerakan ini cukup besar dilihat dari awal kemunculannya di tanah Jawa yaitu di Jawa Barat yang kemudian memicu pergerakan yang sama di beberapa belahan wilayah di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan.⁹ Dalam perjalanan panjang pergerakan DI/TII yang mengusung berdirinya NII, terjadi pemberontakan yang cukup besar di

⁸ Mohamad Roem, *Bunga Rampai Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)43.

⁹ Nugraheni Setiawan Yusuf, "Mengenang Sejarah, Merefleksikan Penyertaan Allah : Sebuah Rancangan Ibadah Peringatan Terbebasnya Gereja Toraja Dari Kekuasaan DI/TII," *Jurnal Abdiel* 6, no. 1 (2022): 22.

sejumlah wilayah di Indonesia yang mengakibatkan banyak pihak mengalami kerugian. Dengan kondisi seperti itu, Soekarno sebagai pemimpin negara didesak oleh berbagai pihak untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa DI/TII beserta beberapa gerakan lainnya adalah kelompok pemberontak yang pada akhirnya berujung dengan ditangkapnya Kartosuwirjo pada bulan Juni 1962 dan kemudian menjalani hukuman eksekusi pada bulan September 1962 dari vonis mati yang diputuskan oleh Mahkamah Angkatan Darat.¹⁰

Selain pergolakan dari beberapa gerakan pengusung negara Islam yang muncul pasca kemerdekaan, upaya untuk menghidupkan peran dan tubuh Islam dalam politik di Indonesia pada masa pemerintahan orde lama era demokrasi terpimpin pun disebut sebagai era sulit bagi partai Islam di mana terjadinya pembubaran partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960.¹¹ Kondisi ini membuat posisi politik Islam melemah serta pergerakan dalam pemerintahan cukup sempit dan hanya mengambil peran pinggiran saja. Sementara kalau kita melihat kondisi politik Islam masa orde baru, pergerakan partai Islam nampak lebih sempit lagi. Meskipun begitu, dengan adanya proses fusi partai politik, sebenarnya membuat beberapa partai Islam yang terpecah-pecah, terkumpul dalam satu wadah saja sehingga kondisi politik Islam kala itu memberi kesan bersatunya kekuatan yang cukup besar dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, pemerintahan presiden kedua Indonesia ternyata lebih cenderung tertarik untuk berkolaborasi dengan kalangan militer dan abangan-kejawen. Bahkan Soeharto tidak memberi ruang untuk perkembangan Islam di ranah perpolitikan.¹²

¹⁰ M.H Budi Santoso, *Darul Islam : Pemberontakan di Jawa Barat*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Jaya, 2013).

¹¹ Jainuddin, "Islam dan Politik Orde Lama: 'Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno,'" *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 226.

¹² Yudi Latif, *Inteligensia Muslim Dan Kuasa : Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Jakarta: Democracy Project, 2012) 71.

Panjangnya proses sejarah di mana umat Islam berusaha memunculkan tubuh dan pemikirannya pasca kemerdekaan ke dalam ruang publik di Indonesia terkhususnya dalam hal perpolitikan, meski mengalami pasang surut, namun pada kenyataannya tidak menjadikan angan besar itu terkubur dalam-dalam. Faktanya, dambaan akan penerapan syariat Islam bahkan angan-angan negara Khilafah dalam sepanjang sejarah di Indonesia terus menerus mewarnai pergulatan politik di negara ini, bahkan sampai detik ini.

Nurcholish Madjid yang dikenal sebagai *Guru Bangsa* sendiri memiliki pandangan khusus terkait permasalahan ini. Jargonnya yang cukup terkenal ialah “*Islam, Yes! Partai Islam, No?*” yang seringkali salah ditulis dengan tanpa menggunakan tanda tanya hingga semakin memicu perbincangan dan respon yang cukup sensitif.¹³ Menurut Cak Nur, kemunculan pemikiran terkait negara Islam atau Islam sebagai negara merupakan sebuah distorsi relasi antara agama yang sifatnya suci dan sakral dengan negara yang sifatnya duniawi pun senantiasa berurusan dengan politik yang beraneka ragam wajah. Bagi Nurcholish, menganggap agama sebagai sebuah ideologi adalah anggapan yang keliru sebab agama posisinya lebih dari sekadar ideologi, lebih tinggi dari itu.¹⁴ Nurcholish sendiri mengungkapkan bahwa ia lebih cenderung menitikberatkan pemikirannya pada konsep pendekatan substantifistik dalam tradisi politik Islam. Di mana pendekatan ini lebih kepada penerapan nilai-nilai universal yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, bukan kepada bentuk pendekatan formalitas. Nilai-nilai ini yang menurut Nurcholish telah turun dan diadopsi oleh beberapa tokoh kemanusiaan seperti John Lock dan Thomas Jefferson.¹⁵

¹³ *Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid - Mohamad Roem*, 2nd ed. (Jakarta: Djambatan, 2000)110.

¹⁴ Susilo Surahman, “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid,” *Jurnal Dakwah* 11, no. 2 (2010): 132.

¹⁵ Muhammad Taufiq Rahman dan Asep Saeful Mimbar, “Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 386.

Dalam surat-surat politiknya dengan Mohamad Roem seorang tokoh besar bangsa, Nurcholish Madjid banyak mendiskusikan pemikirannya terkait dengan tradisi politik Islam di mana awal dari diskusi politik tersebut didasarkan oleh pernyataan Amien Rais yang menyatakan bahwa “Tidak Ada Negara Islam”. Nurcholish sendiri secara terang-terangan menyatakan setuju dan mendukung juga pernyataan Mohamad Roem yang ditulis atas respon sekata dengan pandangan Amien Rais tersebut. Selain itu, Nurcholish juga menyatakan dalam surat itu bahwa ia melihat kesejajaran idenya dengan ide Fathi Osman yang saat itu merupakan pimpinan redaksi Majalah *Arabia* dari Inggris. Ide yang terdiri atas beberapa poin tersebut secara tersirat membahas bahwa dalam bidang politik, Islam hanya menekankan pada garis besar dari segi etisnya saja. Ini dimaksudkan agar kaum muslim di tiap zamannya dapat bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu agar agama Islam bisa tetap eksis sesuai dengan zaman di mana ia hidup.¹⁶ Poin lainnya juga menyebutkan bahwa politik bukanlah bagian dari syariah yang sempit, bahkan umat Islam dalam berpolitik dibenarkan dan diperbolehkan untuk mengadaptasi serta mencontoh orang yang bukan muslim, selagi pemikiran dan tindakan yang diadopsi sesuai dan tidak bertentangan dengan substansi atau nilai yang diwariskan oleh Nabi SAW.¹⁷

Sebutan formalistik “*Negara Islam*” menurut Cak Nur tak pernah digunakan oleh Nabi SAW sendiri bahkan oleh penggantinya selama berabad-abad lamanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep tersebut yang muncul dan mewarnai ideologi politik umat Islam bukan lahir dari esensi agama Islam seutuhnya tapi dari gejala historis-sosiologis.¹⁸

¹⁶ *Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid - Mohamad Roem*, 2nd ed. (Jakarta: Djambatan, 2000) 26.

¹⁷ *Ibid.*, 27.

¹⁸ *Ibid.*, 29.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini merujuk kepada ihwal yang menjadi masalah setiap zaman dalam konsep politik Islam yaitu masih adanya pemikiran dan keinginan di dalam tubuh umat Islam terkhusus di Indonesia untuk menegakkan negara Islam atau negara Khilafah, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor pemicu pemikiran tersebut berdasarkan analisis historis-kritis. Selain itu perlu adanya identifikasi lebih lanjut terkait hal tadi lewat kacamata tokoh intelektual islam Indonesia yaitu Nurcholish Madjid.

Batasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada latar belakang historis terkait hubungan Islam dan politik dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia pada masa orde baru. Alasan di balik digunakannya batasan penelitian yang terbatas pada era Orde baru dikarenakan pada era tersebut pemikiran Nurcholish Madjid sedang ranum-ranumnya membahas dan tertuju kepada persoalan Islam dan politik. Hal ini terbukti pada 5 tahun awal di era Orde baru Nurcholish menyampaikan gagasannya terkait Islam dan politik dalam bentuk jargon “*Islam, Yes. Partai Islam, No?*” yang pada era tersebut menjadi cukup menggemparkan dan terus dibahas entah di diskusi langsung atau dikritik lewat media massa.

Selain itu penulis melihat bahwa persoalan terkait Islam dan politik terbilang cukup intens terjadi para era Orde baru, baik dikarenakan faktor internal ataupun faktor eksternal yang lahir dari tubuh kalangan Islam sendiri. Dalam kondisi-kondisi yang menegangkan inilah yang kemudian Cak Nur turun langsung merespon situasi tersebut dengan gagasan-gagasan segar ala beliau. Pada penelitian ini, penulis juga akan banyak menyinggung terkait konsep Negara Islam yang tak lekang oleh ruang dan waktu dan terus menghantui pemikiran terkait politik Islam di Indonesia sampai detik ini. Penelitian ini sudah jelas terbatas pada perspektif atau pandangan Nurcholish Madjid terkait relasi politik dan agama serta konsep negara Islam dalam perjalanan sejarah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi agama dan politik di Indonesia masa orde baru berdasarkan pandangan Nurcholish Madjid?
2. Bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang konsep negara Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini pun terdiri atas poin yang kurang lebih selaras, yaitu :

1. Untuk mengetahui relasi agama dan politik di Indonesia masa orde baru berdasarkan pandangan Nurcholish Madjid.
2. Untuk mengetahui pandangan Nurcholish Madjid tentang konsep negara Islam.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang sangat penting baik dalam khasanah intelektual Islam di Indonesia pun dalam hal terkait tradisi politik Islam yang sampai detik ini masih ada beberapa konsep yang perlu ditelaah dan dikaji lebih dalam dan mapan lagi. Hal ini disebabkan karena lahir kesadaran dari diri peneliti bahwa masih adanya warisan dengan tafsiran yang keliru sampai saat ini, dan tafsiran tersebut nampaknya menancap kuat dalam pemikiran sebagian umat muslim di tanah air kita yang multikultural ini. Pun sikap romantisasi sejarah masa lalu membuat sebagian umat Islam menjadi *stuck* di tempat, tanpa adanya usaha untuk mengembangkan warisan yang ditinggal oleh Nabi SAW dan mengkajinya lagi agar selaras dengan kondisi ruang dan waktu yang semakin berkembang ini sehingga agama Islam akan senantiasa bereksistensi hingga akhir zaman.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas terkait topik yang terbilang cukup selaras dengan topik yang diangkat oleh peneliti seperti relasi politik dan agama serta konsep politik Islam dalam pandangan berbagai tokoh pun dalam pandangan Nurcholish Madjid, baik berupa skripsi maupun dalam bentuk artikel ilmiah. Beberapa tinjauan pustaka ini digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk melengkapi dan mewarnai serta memberikan gambaran secara garis besar bagi peneliti agar bisa dikembangkan lebih mapan lagi berkenaan dengan topik penelitian yang akan diteliti nanti. Beberapa tinjauan pustaka dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul *Hubungan Agama dan Politik Dalam Pandangan Hassan Al-Banna dan Relevansinya di Indonesia* yang ditulis oleh Rusli Kurniawan membahas terkait relasi antara agama dan politik berdasarkan perspektif Hassan al-Banna di mana dijelaskan bahwa definisi politik bagi Hassan al-Banna adalah suatu hal yang memikirkan persoalan ummat. Selain itu Hassan al-Banna menghubungkan aqidah suatu konsep dalam agama dengan aktivitas politiknya. Sehingga relasi antara agama dan politik dikatakan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain, pun saling menguntungkan satu sama lain.¹⁹
2. Skripsi dengan judul *Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Muh Ripaldy membahas terkait politik hukum Islam yang menurut Nurcholish Madjid merupakan suatu bentuk orientasi keislaman yang kuat dan selalu dikaitkan dengan opisisi terhadap pemerintah. Dalam kesimpulannya, Muh Ripaldy menekankan bahwa bagi Nurcholish Madjid, politik hukum Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah kaum muslim menjadi politikus, namun

¹⁹ Rusli Kurniawan, “Hubungan Agama dan Politik Dalam Pandangan Hassan Al-Banna dan Relevansinya di Indonesia” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan ukhrawi.²⁰

3. Skripsi dengan judul *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Muflihudin. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Fiqh Siyasah yang menjadi sudut pandang dalam memandang pemikiran politik Nurcholish Madjid terkait relasi Islam dan negara sepenuhnya memberikan keluasaan kepada umat untuk membentuk konstitusi sebagaimana kondisi perkembangan zaman dan sosial masyarakat. Sementara dalam pandangan Nurcholish, yang penting adalah bagaimana kita menerapkan nilai Islam sebagai sebuah etika politik nasional sehingga tanpa adanya simbol Islam pun, substansi Islam sudah terserap dalam hidup berbangsa dan negara.²¹

Dalam beberapa penelitian yang peneliti paparkan di atas, terlihat dengan jelas terkait persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga perbedaannya. Pada skripsi pertama memperlihatkan persamaan yang cukup jelas yaitu sama-sama membahas tentang hubungan atau relasi antara politik dan agama. Namun ada perbedaan yang nampak di sini yaitu perbedaan sudut pandang tokoh. Skripsi pertama menggunakan perspektif Hassan Al-Banna sementara peneliti menggunakan sudut pandang Nurcholish Madjid yang dengan jelas menampilkan perbedaan arah. Untuk skripsi yang kedua menampilkan kesamaan yang cukup spesifik yaitu terkait penggunaan sudut pandang tokoh yang sama, Nurcholish Madjid. Pembahasannya pun hampir mirip, terkait politik, namun pada skripsi yang ditulis oleh Muh Ripaldy tersebut secara khusus membahas politik hukum Islam, sementara peneliti dalam skripsi ini membahas terkait relasi agama dan

²⁰ Muh Ripaldy, "Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

²¹ Muflihudin, "Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

politik dengan menggunakan analisis historis-kritis yaitu lewat kajian sejarah kritis.

Untuk skripsi ketiga menampilkan persamaan yang cukup jelas juga, sama-sama membahas terkait pemikiran Nurcholish Madjid terkait relasi agama dan negara, namun perbedaannya jelas juga terletak pada perspektif yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu dikhususkan pada sudut pandang Fiqh Siyasah. Dari ketiga skripsi tersebut menampilkan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait hubungan agama dan negara, ada juga kesamaan sudut pandang tokoh yaitu menggunakan perspektif Nurcholish Madjid. Namun perbedaannya terletak pada beberapa poin seperti penelitian yang akan peneliti kembangkan lebih merujuk kepada penggunaan kajian sejarah kritis dalam mengkaji hubungan agama dan politik di Indonesia.

Selain tinjauan pustaka berupa skripsi terdahulu, peneliti juga menggunakan tinjauan berupa Jurnal Artikel atau Artikel ilmiah. Berikut daftar artikel tersebut :

1. Artikel ilmiah dengan judul *Relasi Agama dan Politik Menurut Rawls* yang ditulis oleh Samsul Ma'arif menampilkan pembahasan terkait pandangan Rawls tentang hubungan antara agama dan politik dan juga permasalahan ideologi yang secara historis di Indonesia selalu diselimuti oleh polemik. Rawls sendiri memberikan pendapat bahwa menurutnya agama tentu saja tetap menempati tempat yang strategis, namun ketika agama masuk ke ranah publik sebaiknya harus ditransformasikan lewat alasan-alasan yang bersifat lebih universal.²²
2. Artikel ilmiah dengan judul *Relasi Agama dan Politik di Indonesia* yang ditulis oleh Adang Sonjya dan Budi Rahayu Diningrat membahas terkait hubungan agama dan kekuasaan yang disebutkan bahwa konsepnya berbeda diantara tiap-tiap agama maupun doktrinnya. Di Indonesia sendiri konflik terkait agama dan kekuasaan terlihat dengan jelas pada era pasca

²² Samsul Ma'arif, "Relasi Agama dan Politik Menurut Rawls," *Jurnal Filsafat* 16, no. 2 (t.t.).

kemerdekaan dan hal itu memicu banyak pergolakan terjadi di mana-mana dan diantara berbagai pihak.²³

3. Artikel ilmiah dengan judul *Politik Hukum : Relasi Antara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia* yang ditulis oleh Kholid Irfani membahas terkait kondisi Indonesia di mana masyarakat yang heterogen tinggal bersama dalam satu bangsa dan negara. Tentunya ada peran penting terkait politik, hukum dan agama dalam mengatur kehidupan bangsa, namun konsep tersebut dikatakan oleh Kholid yaitu berupa sebuah tata nilai etika yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Islam.²⁴

Berdasarkan ketiga artikel ilmiah yang digunakan peneliti sebagai tinjauan pustaka, memperlihatkan persamaan serta perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada inti pembahasan yaitu terkait relasi atau hubungan antara agama dan politik, namun secara bersamaan juga terlihat perbedaan semisal pada artikel ilmiah pertama menggunakan sudut pandang tokoh yang berbeda yaitu Rawls. Pada 2 artikel ilmiah terakhir tidak mengerucutkan penelitian ataupun pembahasan mereka kepada pandangan atau perspektif satu tokoh saja. Sementara penelitian yang akan peneliti kembangkan merujuk kepada kajian pemikiran tokoh yaitu Nurcholish Madjid sebagai tokoh yang peneliti pilih dalam membaca konsep relasi agama dan politik di Indonesia.

G. Kerangka Konseptual (*Conceptual Framework*)

Mengenai kerangka konseptual, peneliti menggunakan konsep *The Political Relevance Of Religion* dari William Montgomery Watt. Dalam bukunya dengan judul *Islamic Political Thought* atau dalam versi terjemahan bahasa Indonesianya yang berjudul *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* dijelaskan bahwa secara umum, relasi antara agama dan politik dapat ditinjau dari berbagai aspek.

²³ Adang Sonjaya, Budi Rahayu Diningrat. "Relasi Agama Dan Politik Di Indonesia," *Jurnal CIC Lembaga Dan Konsultasi Sosial* 5, no. 1 (2023): 28.

²⁴ Kholid Irfani, "Politik Hukum : Relasi Antara Politik, Hukum dan Politik di Indonesia," *Jurnal Politik Walisongo* 4, no. 1 (2022): 22.

Misalnya saja, dalam melihat hubungan antara agama dan politik, poin pertama yang harus dipertimbangkan ialah bagaimana kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat. Apakah agama atau pemikiran keagamaan memiliki andil dalam membentuk kerangka intelektual seseorang atau masyarakat dalam setiap tindakan mereka. Atau, apakah agama kemudian mempengaruhi tindakan seseorang atau masyarakat sehingga tingkah laku serta gambaran kehidupan mereka lebih terarah dengan cara-cara tertentu. Mungkinkah kedudukan agama di dalam masyarakat atau dalam kehidupan seorang individu berperan dalam mengarahkan tujuan ataupun motif manusia dalam menjalani kehidupan.²⁵

Menurut Watt sendiri, agama disimpulkan memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan seseorang. Karena agama datang dengan membawa tujuan umum kehidupan dan membantu mengarahkan manusia dalam menempuh serta mencapai tujuan tersebut. Bagi Watt, *If some of its prescriptions of individual morality conflict with the moral ideas generally accepted in the community and enforced by the state, there's a possibility of conflict* – Jika beberapa aturan moral individu dari agama bertentangan dengan ide atau pemikiran yang secara umum telah diterima dalam masyarakat dan ditegakkan serta diundangkan oleh negara, maka ada kemungkinan untuk bertentangan.²⁶ Namun dalam kajian lebih lanjut, agama tidaklah memiliki konsep-konsep politik bagi umatnya. Yang sebenarnya ada ialah agama kadangkala mendukung konsep-konsep politik regional tempat asal dan tumbuhnya agama tersebut.

Landasan konseptual inilah yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pijakan dalam mengkaji penelitian, yaitu terkait relasi agama dan politik di Indonesia perspektif Nurcholish Madjid. Kerangkanya akan berupa bagaimana posisi Islam dalam lingkup kehidupan masyarakat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengalami sejumlah kondisi dan keadaan yang beraneka

²⁵ William Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Beunebi Cipta, 1987).

²⁶ *Ibid.*, 34.

rupa di Indonesia, mulai dari pra kemerdekaan, masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Peneliti sendiri menetapkan batasan penelitian terbatas kepada masa orde baru dengan usaha menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana kondisi hubungan agama dan politik serta bagaimana posisi dan kedudukan Islam di masyarakat dan juga dalam bernegara pada era tersebut. Apakah konsep, ide dan pemikiran keagamaan Islam bertentangan atau tidak dengan pemikiran dan ideologi yang berlaku di Indonesia pada masa orde baru.

Dalam proses menganalisis temuan penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang dari Nurcholish Madjid, seorang tokoh pembaharu yang banyak menuangkan buah pikirannya dalam kajian politik. Sebenarnya ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa penulis memilih membaca konsep relasi agama dan politik di Indonesia lewat kacamata guru bangsa yang akrab disapa Cak Nur ini. Jika melihat latar belakang Cak Nur, tentu saja begitu mudah untuk menyimpulkan alasan penulis, sebab masa kecil Cak Nur diwarnai oleh sekelumit kondisi terkait persoalan politik. Pun di masa beliau melanjutkan studinya ke Chicago University untuk menempuh pendidikan S2, Cak Nur juga memilih untuk memfokuskan kajiannya terkait persoalan politik. Di masa-masa setelah itu, peran serta pemikiran Cak Nur banyak dituangkan dalam ranah perpolitikan di tanah air yang saat itu sedang berada dalam situasi yang tidak stabil.²⁷ Perannya begitu besar bahkan hingga penghujung masa orba, Cak Nur adalah salah seorang yang dipilih Soeharto untuk memperbincangkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Lewat fakta sejarah ini, sebenarnya sangat mudah untuk kita simpulkan bahwa Cak Nur punya peran tersendiri dalam lingkup pemikiran politik di Indonesia. Khususnya juga terkait pemikiran Politik Islam, yang tercermin dari jargonnya yang sensasional “*Islam, Yes! Partai Islam, No?*”. Jargon ini kemudian banyak disalahpahami oleh sejumlah pihak yang

²⁷ H. Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, dan Zamin Zatus, “1998 Reform Movement,” *Indonesian Journal Of Applied And Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 6 (t.t.): 556.

menganggap bahwa Cak Nur adalah tokoh bangsa yang cukup sentitif dan selalu mengkritik partai Islam di Indonesia.

Selain menggunakan konsep *The Political Relevance Of Religion*, penulis mengadopsi beberapa konsep pemikiran Watt untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam meninjau kembali terkait persoalan tentang negara Islam yang merupakan suatu konsep yang sering disinggung-singgung oleh Cak Nur. Seperti yang secara umum diyakini oleh kebanyakan umat Islam, bahwasanya konsep negara Islam adalah sebuah konsep yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi mulai membangun sebuah kekuatan politik setelah hijrah ke Madinah. Lewat peristiwa sejarah ini, peneliti akan meninjau bagaimana fakta historis terkait relasi agama dan politik yang dibangun pada masa Nabi Muhammad di Madinah sehingga kemudian dimaknai umat Islam masa kini bahwa konsep itu adalah sebuah konsep negara Islam yang langsung dicontohkan Nabi SAW.

Lewat pemikiran Watt terkait dengan konsep negara Islam di masa klasik, penulis jelas akan mengarahkan kajian untuk melihat bagaimana peran Nabi Muhammad yang disebut Watt dalam *Islamic Political Thought* sebagai *Head of state* dalam membangun sebuah citra penguasa lewat berbagai keberhasilan dalam perannya sebagai seorang Qaid yang berhasil memimpin sekaligus memenangkan peperangan serta membuat deklarasi dan dokumen-dokumen perjanjian yang kemudian menarik perhatian suku-suku lain untuk turut beraliansi dan menjalin hubungan persahabatan dengan Nabi Muhammad. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad menjadi semakin membaik, bahkan jauh lebih baik dari masa Nabi Muhammad di Makkah. Dan tak bisa dipungkiri, dengan kekuatan dan otoritasnya yang semakin mendominasi, Nabi Muhammad sedikit demi sedikit membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan bidang ke-

Rasulan, khususnya terkait dengan pelaksanaan perintah-perintah Al-Qur'an.²⁸ Dari sinilah peneliti dapat melihat dengan jelas bahwa dalam sejarah Islam awal terdapat peran agama yang cukup kental dalam praktik politik Nabi Muhammad atau dalam membangun sebuah relasi kuasa semenjak hijrah Nabi ke Madinah. Inilah sebagian gambaran topik yang akan dikaji oleh penulis dengan landasan konseptual dari Watt. Konsep ini yang juga nantinya akan menyingkap bagaimana ide-ide tentang negara Islam yang sering didambakan oleh umat Islam di hampir seluruh dunia, di mana konsep ini juga yang sering diperbincangkan oleh sejumlah umat Islam di Indonesia, terkhusus Cak Nur dan kawan-kawan yang begitu getol menyetujui pernyataan Amien Rais terkait Tidak adanya negara Islam.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis merasa perlu untuk membahas terlebih dahulu terkait jenis dari penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka. Di mana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan meninjau literatur-literatur dalam bentuk karya tulis seperti buku, artikel, skripsi dan sejenisnya terkait dengan topik yang dikaji oleh peneliti yaitu *Relasi politik dan agama di Indonesia perspektif Nurcholish Madjid*. Sementara metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Heuristik sendiri ialah tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah di mana pada tahapan ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber atau objek yang akan digunakan sebagai memperkaya pun memperkuat penelitian yang dikaji.²⁹ Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi atas data primer dan sekunder. Data Primer yang digunakan peneliti bersumber dari karya-karya Nurcholish Madjid yang dispesifikasikan pada 3 bukunya saja, yaitu Tidak Ada Negara Islam, Islam : Doktrin dan Peradaban, dan Islam,

²⁸ William Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Beunebi Cipta, 1987)31.

²⁹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos : Wacana Ilmu, 1999) 44.

Kemodernan dan Keindonesiaan. Ketiga buku ini dipilih secara khusus oleh penulis dengan alasan pembahasan dalam ketiga buku ini lebih cenderung berkaitan dengan topik penelitian yaitu tentang agama dan politik di Indonesia. Sementara data sekunder yang peneliti gunakan bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berhubungan dan dapat menunjang topik penelitian yang dikaji penulis khusus literatur yang membahas terkait sejarah politik Islam di Indonesia pun terkait agama dan politik dan lebih khusus literatur yang mengangkat tema pembahasan tentang konsep negara Islam.

Tahapan dalam penelitian sejarah selanjutnya ialah Kritik atau Verifikasi sumber, di mana sumber yang telah dikumpulkan akan dikelola secara kritis sehingga menghasilkan sumber yang dirasa kuat dan otentik. 2 tahapan terakhir adalah *Aufassung* atau Interpretasi (tahap menyimpulkan sumber atau data yang telah dikelola sebelumnya) dan *Darstellung* atau Historiografi (tahap penyusunan dan penulisan dari hasil penelitian sejarah).³⁰

³⁰ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos : Wacana Ilmu, 1999) 44.

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT NURCHOLISH MADJID

A. Latar Belakang Nurcholish Madjid

The man of ideas and the man of ethics, ialah istilah yang dipakai Yudi Latif untuk menggambarkan sosok Nurcholish Madjid. Manusia yang kaya gagasan, tentu akan banyak kita jumpai di luar sana. Namun manusia yang kaya gagasan sekaligus etis, terbilang cukup jarang. Begitupun sebaliknya. Manusia etis mungkin akan ramai kita temui, tapi manusia etis sekaligus kaya gagasan, itu juga susah untuk ditemukan. Bagi Yudi Latif dan sebagian Intelektual Indonesia yang menyelami pribadi serta pemikiran Nurcholish Madjid, istilah tadi ditemukan dalam diri Nurcholish, bahkan dua sekaligus.³¹ Nurcholish Madjid sendiri atau sosok yang lebih akrab disapa Cak Nur ialah seorang tokoh pembaharu intelektual Islam di Indonesia yang banyak menyumbangkan buah pikirannya dalam hal pembangunan pemikiran bangsa Indonesia, terkhusus umat Islam di tanah air. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 M dari keluarga yang begitu kental dengan keilmuan Islam (Pesantren). Ayahnya, KH. Abdul Madjid merupakan seorang murid kesayangan KH. Hasyim Asy'ari dan mempunyai latar belakang keluarga yang konsen dalam dunia pendidikan, pun Ibundanya, Fathanah Mardiyah yang kurang lebih memiliki *background* yang sama dengan ayahnya dalam hal warisan keilmuan.³² Nurcholish kecil mengenyam pendidikan dasarnya di dua tempat sekaligus yaitu pada pagi hari beliau belajar di Sekolah Rakyat sementara pada sore hari beliau menghabiskan waktu belajar di sekolah milik ayahnya sendiri yaitu Madrasah al-Wathaniyah yang kedua sekolah ini

³¹ "HAUL CAK NUR KE #13 #OrasiBudaya Yudi Latif," diakses 21 Januari 2025, <https://youtu.be/YDWbazEERnc?si=-fvO8F7DzySHKFjh>.

³² Cahaya Khaeroni, "NURCHOLISH MADJID (1939-2005) (Gagasan-Gagasan Pembaruan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia)," *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (t.t.): 181.

sama-sama berada di Mojoanyar, Jombang. Sehingga dalam menghabiskan pendidikan di sekolah dasar, guru bangsa yang senang disapa Cak Nur ini telah mengenal dua model pembelajaran yaitu pendidikan agama yang sarat akan kajian kitab kuning yang didapatnya di Madrasah al-Wathaniyah dan pendidikan umum yang didapatnya lewat Sekolah Rakyat.³³

Setelah menempuh pendidikan di SR, Cak Nur melanjutkan pendidikannya ke pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso, Jombang dan bertahan selama 2 tahun di sana. Beliau tidak menghabiskan waktu yang lama di pesantren ini dikarenakan beberapa alasan yang membuatnya tidak *kerasan*. Alasan yang pertama adalah kondisi jasmani Cak Nur yang tidak dalam keadaan baik saat itu atau ada permasalahan terkait dengan kesehatan fisik beliau. Sementara alasan yang kedua menurut peneliti cukup menarik jika dikaitkan dengan terbentuk pemikiran Cak Nur kecil. Alasan kedua yang melatarbelakangi terkait tidak *betahnya* Cak Nur dalam mengenyam pendidikan lanjutannya di Darul ‘Ulum dikarenakan adanya permasalahan terkait ideologi politik. Abdul Madjid, ayah Cak Nur yang merupakan Kyai NU dan pada saat yang sama juga merupakan aktifis partai politik Masyumi di tengah kondisi NU yang memutuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi. Keputusan yang diambil ayah Cak Nur sebenarnya sesuai dengan apa yang diamanahkan gurunya KH. Hasyim Asy’ari yaitu bahwa Masyumi adalah satu-satunya wadah aspirasi umat Islam di Indonesia. Keputusan dan posisi ayah Cak Nur saat itu membuat Nurcholish kecil merasakan beratnya reaksi dari pihak lain di mana beliau seringkali diejek dan diledak sebagai “*Bocah Masyumi yang kesar di pondok pesantren NU*”. Hal ini terus menerus dilakukan oleh orang-orang disekitarnya dan membuat Cak Nur tidak nyaman sehingga beliau

³³ Fauzi, *Politik Islam : Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam Indonesia*, 1 ed. (Bintan: STAIN SAR PRESS, 2022), 37.

memutuskan untuk pindah dari Darul ‘Ulum ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.³⁴

Setelah pindah ke Gontor, Cak Nur merasakan sebuah perbedaan yang cukup jelas dengan pesantren sebelumnya. Cak Nur menuturkan bahwa di Gontor, santri yang berpartisipasi dalam olahraga sepak bola menggunakan celana pendek. Ini bukan hal yang biasa sebab di lingkungan pesantren khususnya di pesantren Cak Nur sebelumnya yaitu Darul ‘Ulum, santri yang bermain sepak bola masih mengenakan sarung. Pun dalam melaksanakan sholat, penggunaan sarung adalah suatu keharusan. Namun di Gontor jelas berbeda menurut pengalaman Cak Nur. Santri yang sholat diperbolehkan mengenakan celana panjang dan bahkan tanpa menggunakan kopiah. Dalam hal pendidikan pun jelas berbeda. Di Gontor, para santri diharuskan mempelajari dan bahkan menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, pun jika melanggar akan dikenakan hukuman seperti *digunduli*.³⁵ Lewat pendidikan dengan corak modernnya di Gontor, Cak Nur jelas memiliki kesiapan yang matang untuk menempuh pendidikan selanjutnya di jenjang perguruan tinggi. Bagi peneliti, pengalaman masa kecil sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir dan arah pemikiran seseorang, sehingga meskipun pengalaman ini terbilang biasa saja, namun tentu membekas dan sedikit lebih membentuk serta mempengaruhi pola pikir Cak Nur.

Dalam perjalanan Cak Nur di dunia pendidikan perguruan tinggi, Cak Nur melanjutkan studinya ke IAIN Ciputat (Sekarang adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan mengambil jurusan yang sangat berhubungan dengan keilmuan yang sejak kecil telah dipelajari beliau yaitu jurusan Sastra Arab. Pemikiran kritis yang terbentuk dalam perjalanan pendidikan Cak Nur turut mengambil andil

³⁴ Muhammad Jawahir, “Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Politik Islam” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 43.

³⁵ Budhy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid : Islam dan Pluralisme* (Jakarta, 2011), 3.

dalam penyusunan tugas akhir yang dicerminkan melalui judul skripsi beliau yaitu *“al-Qur’an ‘Arabiyyah Lughatan Wa ‘Alamiyyun Ma’nan”* yang memiliki terjemahan *“al-Qur’an ditinjau dari bahasa bersifat lokal, dipandang dari sisi makna bersifat universal”*.³⁶ Lewat judul skripsi tersebut, kita dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual dan pola pikir kritis Cak Nur dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang dialami langsung oleh beliau. Jelas penelitian skripsi Cak Nur ditulis selain atas kajiannya terhadap topik utama, pun juga berdasarkan fenomena yang terjadi sepanjang perjalanan hidup beliau dengan melihat kondisi intelektual kaum muslim di Indonesia saat itu. Pada periode selanjutnya, berdasarkan pemaparan Prof. Muhammad Wahyuni Nafis, ketua Nurcholish Madjid Society (NCMS) dalam pertemuan Sekolah Pemikiran Cak Nur (SPCN), dijelaskan bahwa Fazlur Rahman, seorang tokoh pembaharu Islam yang cukup terkenal, bersama dengan rekannya datang ke Indonesia untuk mencari seorang potensial yang akan diberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Chicago University, yang kemudian setelah melalui proses yang lumayan panjang, akhirnya Cak Nur terpilih untuk melanjutkan pendidikannya di sana dengan mengambil jurusan Ilmu Politik dan Filsafat Islam di mana topik kajian akhir (Disertasi) beliau membahas terkait pemikiran Ibnu Taimiyah di bawah bimbingan langsung dari Fazlur Rahman.

Di masa-masa produktif Cak Nur, beliau bukan hanya menghabiskan waktu di dunia pendidikan, namun juga terjun langsung ke dalam ranah aktifis lewat bergabungnya beliau di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bahkan beliau pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI selama 2 periode berturut-turut dari tahun 1966 hingga tahun 1971. Cak Nur bukan hanya berpartisipasi dalam satu organisasi saja, namun beliau juga tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) dan sempat menjabat sebagai presiden PEMIAT dalam periode tahun 1967-1969 dan

³⁶ Ripaldy, “Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia.”

periode 1969-1971, serta bergabung dalam *International Islamic Federation Of Student Organization* (IIFSO) yang juga Cak Nur pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum dalam organisasi tersebut.³⁷ Lewat pengalamannya yang cukup besar dalam wadah organisasi, Cak Nur terbentuk menjadi seorang intelek yang kritis dan begitu paham dengan situasi serta kondisi umat saat itu. Beliau bukan hanya mengabdikan dan berpartisipasi dalam urusan-urusan organisasi, namun Cak Nur seringkali turun langsung dalam urusan-urusan penting bangsa dan negara, misalnya saja dalam detik-detik sebelum turunnya Presiden Kedua Republik Indonesia dari bangku kepemimpinannya. Saat itu, dalam kegundahan Soeharto akan guncangan posisinya yang begitu dahsyat serta kondisi masyarakat Indonesia yang tidak stabil, atas pinta pribadi, Soeharto meminta saran langsung dari Cak Nur terkait apa dan bagaimana sikap yang harus diambilnya dalam kondisi sekacau itu. Dengan tegas dan lugas, Cak Nur menyatakan bahwa tidak ada keputusan yang paling baik dan bijak selain Soeharto turun dari jabatannya sebagai pemimpin negara kala itu.³⁸

Kepedulian Cak Nur akan bangsa tidak hanya terjadi dalam satu dua tahun saja, namun atas simpati beliau dan kepeduliaannya terhadap kondisi umat di masa itu hingga masa mendatang, pada tahun 1986 Cak Nur dan kawan-kawan sepakat mendirikan sebuah pusat studi dan kajian yang mewadahi pergerakan serta pengembangan intelektual Islam yang diberi nama Yayasan Wakaf Paramadina.³⁹ Dimasukkannya kata Wakaf dalam nama pusat studi yang didirikan Cak Nur dan kawan-kawan bukan tanpa alasan. Namun dalam pemaparan Prof. Muhammad Wahyuni Nafis, dikatakan bahwa Cak Nur menggunakan kata wakaf dengan alasan supaya dalam menjalankan serta mengembangkan yayasan tersebut, para stakeholder tidak terlalu pusing dalam hal siapa yang akan memimpin atau siapa

³⁷ Abd. Latief R, "NURCHOLISH MADJID (Kajian Historis tentang Perannya Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia)" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 16.

³⁸ *Ibid*, 25.

³⁹ Susilo Surahman, "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid," *Jurnal Dakwah* 11, no. 2 (2010): 130.

yang akan memiliki kewenangan di dalamnya. Yang Cak Nur inginkan adalah ketekunan dan kepedulian para stakeholder dalam mengembangkan kajian intelektual bangsa serta menyediakan apa yang dibutuhkan umat dalam setiap situasi.⁴⁰

B. Karya-karya dan Khasanah Pemikiran Cak Nur

Dalam perjalanan sejarah kehidupannya, Nurcholish Madjid tentu saja menyalurkan pemikiran bukan hanya lewat lisan seperti ceramah dan sejenisnya, namun Cak Nur pun menuangkan buah pikirnya ke dalam berbagai bentuk tulisan yang kemudian masih bisa diakses pun dibaca sampai detik ini. Sebelum buku-buku yang berasal dari kumpulan sejumlah artikel yang ditulis oleh Cak Nur diterbitkan, ada karya-karya fenomenal yang lebih dulu sudah dikenal oleh kalangan intelektual Islam Indonesia. Salah satunya adalah makalah dengan judul *Dasar-Dasar Islamisme* yang ditulis pada tahun 1964. Cak Nur seringkali menggunakan makalah ini sebagai bahan dalam ceramahnya di HMI di setiap kesempatan.⁴¹ Pada tahun 1969, Cak Nur lanjut melengkapi makalah *Dasar-Dasar Islamisme* sehingga versi terbarunya kemudian menjadi pedoman penuntun dalam hal orientasi bagi anggota HMI sampai hari ini, dengan judul *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* (NDP). Ada latar belakang yang cukup menarik dari penulisan karya Cak Nur satu ini. Salah satu alasan lahirnya *Dasar-Dasar Islamisme* adalah atas tergugahnya Cak Nur dengan gagasan Sosialisme Islam-nya Tjokroaminoto. Namun bersamaan dengan itu Cak Nur menyadari bahwa gagasan yang tertuang dalam buku Tjokroaminoto dirasa terbatas dan hanya membahas terkait sosialisme saja. Bagi Cak Nur, Sosialisme Islam tidak mencakup pembahasan terkait *Weltanschauung* secara lebih luas. Sehingga atas momen ketergugahan tersebut, Cak Nur kemudian memutuskan untuk melahirkan sebuah karya yang lebih

⁴⁰ Muhammad Wahyuni Nafis, “Institusionalisasi Pemikiran Cak Nur : Yayasan Wakaf Paramadina dan Masjid Madinatul-’Umran” (Online (Zoom), 21 November 2024).

⁴¹ *Karya-Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020).

sistematis membahas terkait sosialisme untuk generasi muda khususnya mahasiswa yaitu makalah dengan judul *Dasar-Dasar Islamisme*.⁴²

Selanjutnya isi dari *Dasar-Dasar Islamisme* kemudian disempurnakan dengan ditambahkannya bahan-bahan yang dikumpulkan pun diperoleh Cak Nur dalam perjalanannya di Timur Tengah. Sebenarnya, selain alasan fenomenal tadi yang melatarbelakangi disusunnya NDP dari makalah *Dasar-Dasar Islamisme*, Cak Nur mengakui bahwa beliau memiliki alasan lain yang memprovokasi keinginannya tersebut. *Pertama*, menurut Cak Nur saat itu belum ada suatu bahan bacaan yang komprehensif dan sistematis yang membahas terkait ideologi Islam. *Kedua*, Cak Nur merasa iri dengan generasi muda komunis di mana mereka telah dibekali oleh buku pedoman yang berjudul *Pustaka Kecil Marxis* (PKM) yang di dalamnya membahas terkait pedoman intelektual komunis. Untuk alasan yang *ketiga*, dilandasi oleh ketertarikan Cak Nur terhadap karya dan pemikiran Willy Eichler terkhususnya buku yang berjudul *Fundamental Values and Basic Demands of Democratic Socialism*. Dalam karya Eichler itu, Cak Nur menemukan konsep terkait rumusan ideologi yang ia inginkan.⁴³ Sehingga atas ketertarikan Cak Nur tersebut, ia secara terang-terangan menyatakan bahwa judul *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* dari karyanya tersebut terinspirasi dari buku Eichler yaitu *Fundamental Values*.

Pada era-era setelah itu, Cak Nur kemudian banyak melahirkan karya-karya segar yang tentu saja begitu fenomenal, di antaranya adalah :

1. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung. Mizan. 1987)
2. *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta. Paramadina. 1992)
3. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta. Paramadina. 1994)

⁴² Muhammad Wahyuni Nafis, "Lahirnya Akar Geneologi Santri : Antara Pendidikan Pesantren Tradisional dan Modern."

⁴³ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, t.t.

4. *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta. Paramadina. 1995a)
5. *Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta. Paramadina. 1995b)
6. *Tradisi Islam : Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta. Paramadina. 1997a)
7. *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta. Paramadina. 1997b)
8. *Masyarakat Religius* (Jakarta. Paramadina. 1997c)
9. *“Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Panutan Ajaran Kahanifan” dalam Seri KKA ke-124/Tahun XII/1997* (Jakarta. Paramadina. 1997d)
10. *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta. Paramadina. 1997d)
11. *30 Sajian Ruhani : Renungan di Bulan Ramadhan* (Bandung. Mizan. 1998a)
12. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta. Paramadina. 1998b)
13. *Cendekiawan dan Religiuitas Masyarakat* (Jakarta. Tekad dan Paramadina. 1999a)
14. *“Demi Islam – Demi Indonesia : Wawancara dengan Nurcholish Madjid”* (Jakarta.. Paramadina. 1999b) (tidak diterbitkan)
15. *Pesan-Pesan Takwa : Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina* (Jakarta. Paramadina. 2000a)
16. *Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji* (Jakarta. Paramadina. 2000b)
17. *Fatsoen Nurcholish Madjid* (Jakarta. Penerbit Republika. 2002a)
18. *Atas Nama Pengalaman : Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jumat di Paramadina* (Jakarta. Paramadina. 2002b)
19. *The True Face of Islam : Essays on Islam and Modernity in Indonesia* (Jakarta. Voice Center Indonesia. 2003)
20. *Indonesia Kita* (Jakarta. Gramedia. 2004a)

21. “*The Founding of Faith for Fiqh Interfaith*” in Sirry, Mun’im A., *Interfaith Theology : Responses of Progressive Indonesian Muslim* (Jakarta. International Center for Islam and Pluralism. 2004b)

C. Transformasi Pemikiran Cak Nur

Terkait dengan khazanah pemikiran, Budhy Munawar Rachman mengkategorikan pemikiran Cak Nur dalam dua periode. Periode I (1965-1978) yaitu terkait keislaman keindonesiaan termasuk di dalamnya tentang sekularisasi dan pembaharuan islam di Indonesia. Periode II (1984-2005) pemikiran Cak berkembang dan semakin kompleks terkait dengan keislaman kemodernan khususnya tentang humanisme islam, hak asasi manusia, demokrasi pun masuk ke dalam isu-isu pluralisme.⁴⁴

1. Periode I

Pada rentang periode I ini, pemikiran Cak Nur terfokus kepada pembaharuan serta pengembangan pemikiran Islam di Indonesia dan menyasar kepada isu-isu modernisasi dan sekularisasi. Sebab kita ketahui bersama bahwa periode ini juga merupakan periode awal dari keruntuhan Orde lama yaitu masa di mana Orde baru mulai berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Pada era ini, Cak Nur dan kawan-kawan menyadari bahwa agar umat Islam bisa terus berkiprah dan bereksistensi di masa peralihan tersebut yang tidaklah mudah untuk dihadapi, perlu adanya sikap terbuka terhadap situasi serta kondisi yang ada. Hal ini bukan berarti Cak Nur dan kawan-kawan menganjurkan umat untuk *manut-manut* saja atas segala kebijakan yang dibuat pada masa Orde baru. Namun, maksud sebenarnya dari sikap keterbukaan itu adalah sebagai bentuk dinamisnya Islam terhadap kondisi, situasi, zaman serta tempat di mana agama itu hidup. Memperlihatkan sikap fleksibel dan ketidakkakuan Islam yang membuat agama

⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan* (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020).

tersebut mampu panjang umur hingga akhir zaman. Sikap ini yang pada akhirnya ditunjukkan Cak Nur dan kawan-kawan lewat pemikiran mereka tentang pembaruan pemikiran, sekularisasi dan modernisasi yang tentu saja tetap berpegang teguh kepada prinsip dan dasar keislaman, pun tetap memperhatikan konsep ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Cak Nur meyakini bahwa perlu adanya pembaruan pemikiran Islam, tercermin dalam istilah “*Memelihara nilai lama yang baik, dan menggali nilai baru yang lebih baik*”. Beliau pun menyetujui pernyataan dari H.R Gibb bahwa jika tidak adanya sikap untuk memelihara nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik, maka umat akan segera menghadapi konflik dalam hal pemikiran, pemiskinan intelektual dan *stuck* dalam menghadapi permasalahan kehidupan di masa mendatang.⁴⁵ Dalam makalah *Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*, Cak Nur menyatakan secara gamblang bahwa dalam usaha melakukan pembaruan pemikiran, tentu saja tidaklah mudah. Akan adanya keterkejutan di beberapa pihak atau golongan yang salah anggap dan meyakini bahwa usaha pembaruan pemikiran Islam adalah usaha untuk menghilangkan tradisi lama Islam yang mengakibatkan hilangnya kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Cak menyatakan bahwa, *bila suatu inisiatif pembaruan telah diambil oleh sebagian umat, maka Sebagian yang lain akan mengadakan reaksi kepadanya. Berkali-kali sejarah telah menunjukkan kebenaran hal itu.*⁴⁶

2. Periode II

Pada periode ke II ini adalah periode di mana pemikiran Cak Nur semakin berkembang lebih kompleks menyasar kepada persoalan yang lebih besar yaitu terkait dengan isu demokrasi, pluralisme dan semacamnya. Terkait dengan demokrasi, Cak Nur merumuskan suatu konsep untuk mewujudkan proses bernegara-bangsa yang ideal di Indonesia yaitu konsep Islam-demokrasi. Islam-

⁴⁵ Rifki Ahda Sumantri, “Pemikiran dan Pembaharuan Islam Menurut Perspektif Nurcholish Madjid di Indonesia,” *An-Nidzam* 6, no. 1 (t.t.): 27.

⁴⁶ Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan*.

demokrasi ini menurut Cak Nur jelas berbeda dengan bentuk teokrasi, sebab teodemokrasi jelas menekan pada segala kebijakan bernegara-bangsa yang kedaulatannya ada di tangan Tuhan, sementara Islam-demokrasi memberikan arahan masyarakat berdasarkan dengan *esensi keislaman* namun kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Sekali lagi, dalam setiap bentuk buah pemikiran yang dihasilkan Cak Nur yang didasari oleh nilai keislaman, bukanlah dalam bentuk formalnya, namun Cak Nur dan kawan-kawan kerap kali mengacu kepada bentuk etis dari agama (Islam).⁴⁷

Dalam hal ini, Cak Nur mengemukakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu proses demokrasi di lingkup masyarakat di antaranya adalah *Pertama*, perlu memperhatikannya kesadaran akan pluralisme atau keragaman (kemajemukan) yang ada, sehingga sikap saling memahami dan menghargai akan turut serta dalam berjalannya proses demokrasi. *Kedua*, demokrasi yang dijalankan dengan proses musyawarah. Dalam musyawarah ini, Cak Nur memperkuatnya dengan gagasan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir yang diusung Cak Nur memperlihatkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mengemukakan ide-idenya dalam bentuk apapun. Proses demokrasi dalam bentuk ini jelas mengutamakan gagasan tiap individu yang sama-sama punya hak untuk dikemukakan yang selanjutnya akan diakomodir untuk mencapai tujuan bersama. *Ketiga*, cara harus sejalan dengan tujuan. Dalam menjalankan proses demokrasi, cara atau langkah-langkah yang ditempuh haruslah sejalan dengan tujuan demi kepentingan masyarakat bersama dan kedaulatan rakyat.⁴⁸ *Keempat*, menjunjung norma kejujuran dalam pemufakatan. Proses demokrasi yang berhasil adalah proses di mana kejujuran menjadi dasar dalam mencapai kesepakatan bersama. Sebab kejujuran adalah pilar utama yang akan menjadikan demokrasi berjalan ideal dan dapat dikatakan sebagai *demokrasi*

⁴⁷ Budi Prayetno, "Konsep Sekularisasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid," *Sulesana* 1, no. 2 (2017): 3.

⁴⁸ Akmal Hawi, "Prinsip-prinsip Islam Tentang Demokrasi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019): 108.

yang berhasil. Kelima, kebebasan nurani dan persamaan hak serta kewajiban. Para pelaku demokrasi harus menjunjung kebebasan nurani dan persamaan hak kewajiban sesama agar berlangsungnya demokrasi yang saling menghargai dan terbuka. *Terakhir, trial and error*. Cak Nur meyakini bahwa proses demokrasi tak akan pernah ada habisnya dan tak akan berhenti sehingga seringkali dalam proses demokrasi yang begitu panjang dan melelahkan, tak bisa dipungkiri kita akan menjumpai proses yang gagal dan perlu adanya upaya untuk bangkit dan mencoba lagi.

Demikianlah ragam buah pikir yang dihasilkan oleh Cak Nur sepanjang hayatnya bukan hanya terfokus pada persoalan-persoalan sederhana, namun juga Cak Nur turun langsung membahas persoalan yang lebih kompleks seperti terkait dengan yang dikaji oleh peneliti yaitu konsep relasi politik dan agama di mana ini menyangkut dengan konsep sekularisasi dan negara Islam. Tema dari penelitian peneliti kali ini cukup intens dibahas oleh Cak Nur pada masa hidupnya mengingat kondisi masyarakat Islam di Indonesia kala itu yang menurut Cak Nur cukup memprihatinkan dari segi pemikiran dan praktik keagamaannya.

3. Perkembangan Pemikiran Politik Cak Nur era Orde Baru

Pada tahun 1966 M, tahun yang sama ketika Cak Nur terpilih menjadi ketua PB HMI, terlihat dengan jelas keberpihakan Cak Nur kepada kalangan Masyumi (dikarenakan juga latarbelakang Cak Nur dipengaruhi corak Masyumi yang sangat kental). Cak Nur dan teman-temannya di Masyumi kala itu cukup gencar dalam melawan gagasan modernisasi yang disodorkan oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Selain itu, Cak Nur pun turut serta dalam kerja membangun kembali partai Islam yaitu Masyumi di era pemerintahan yang saat itu masih sangat belia. Namun setelah mengikuti proses yang cukup intens dalam ruang lingkup politik dan Islam, Cak Nur dan beberapa kawannya memutuskan untuk

mengubah haluan menjadi *tidak mungkin Masyumi direhabilitasi*.⁴⁹ Bagi Cak Nur, masa lalu Masyumi serta persepsi masyarakat luas terhadap Masyumi sudah terlanjur negatif. Selain itu, gagasan-gagasan terkait dengan negara Islam dan semacamnya itu terbilang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat itu dan perlu adanya gagasan baru yang segar agar bisa eksis di lingkup publik. Lewat serentetan alasan tersebut, Cak Nur dan kawan-kawan PB HMI memutuskan bahwa upaya rehabilitasi Masyumi tidak diperlukan lagi, sebaliknya mendukung pendirian partai baru di bawah nilai-nilai Masyumi yang lebih segar dan menarik. Situasi ini memperlihatkan bahwa adanya pergeseran pemikiran politik Cak Nur di masa awal Orde baru dikarenakan pertimbangan Cak Nur yang begitu matang agar Islam tetap eksis di kalangan masyarakat bahkan di kalangan pemerintah.⁵⁰

Pergeseran pemikiran politik Cak Nur terus bergeraj menanjak yang salah satu bukti nyata ialah ketika Cak Nur merespon secara kritis terkait persoalan modernisasi yang menjadi perbincangan yang panas di kalangan masyarakat Indonesia kala itu. Modernisasi sebagai salah satu langkah politis pemerintah dalam melakukan pembangunan negara, mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda dari tiap-tiap kalangan. Yang pada awalnya gagasan modernisasi ini ditolak mentah-mentah oleh Cak Nur pada saat awal menjadi ketua di PB HMI, kembali mengalami putar haluan pemikiran di tahun 1968 ketika Cak Nur mengkritisi gagasan liar bahwa modernisasi adalah westernisasi. Pada saat itu Cak Nur yang masih berstatus mahasiswa menulis sebuah karya yang cukup panjang dengan judul “*Modernisasi adalah Rasionalisasi, bukan Westernisasi*”.⁵¹

Melalui tulisan tersebut, Cak Nur menegaskan bahwa pengertian dan sikap menerima modernisasi adalah tidak hanya boleh, tapi juga merupakan anjuran dan ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an. Sebab Cak Nur menjiwai

⁴⁹ Muhammad Wahyuni Nafis, *Cak Nur Sang Guru Bangsa* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), 42.

⁵⁰ Nafis, 43.

⁵¹ Nafis, 48.

modernisasi sebagai rasional, ilmiah, dan bersesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Lewat sikap inilah bisa dipahami bahwa pemikiran Cak Nur terkait hubungan politik dan Islam terus berkembang menysasar kepada persoalan-persoalan yang sedang *trend* pada masanya. Ini juga memperlihatkan bahwa tidak perlunya merasa malu untuk mengkritik pemikiran yang pernah diyakini dahulu. Sebaliknya mengkritik pemikiran sebelumnya haruslah dilakukan sebab pemikiran yang terbentuk tersebut tidak serta merta selaras dengan kondisi dan tantangan zaman yang ada di masa mendatang. Konsep yang dicontohkan Cak Nur ini yang kita kenal dengan istilah *Idea of Progress*.

Pada masa selanjutnya, pemikiran politik Cak Nur semakin berkembang dengan bukti nyata yaitu respon-respon Cak Nur terkait persoalan politik dan hubungannya dengan Islam yang terjadi pada saat Orde baru. Di tahun 1970, Cak Nur kembali menggoncangkan publik dengan serentetan pernyataannya yang berkaitan dengan kritik terhadap hubungan politik dan Islam yang cukup menegangkan kala itu. Yang paling fenomenal adalah jargon yang dicetuskan beliau kala itu ialah “*Islam, Yes. Partai Islam, No*”. Seperti biasa, istilah dan pernyataan yang dilontarkan Cak Nur bukan tanpa dasar dan hanya bualan belaka. Pernyataan ini mengudara dikarenakan situasi politik Islam kala itu cukup menggelisahkan sebab partai Islam dinilai gagal dalam memperjuangkan aspirasi umat dan malah mempersempit makna Islam. Pernyataan liar yang keluar dari salah satu partai Islam yang saat itu sedang berkontestasi dalam pemilu yaitu *umat Islam patut dipertanyakan keislamannya jika tidak memilih partai Islam*, sangat ditentang oleh Cak Nur. Bagi Cak Nur, sebagai partai yang menggunakan nilai keislaman sebagai dasar pokok, bukan suatu langkah cerdas untuk mengeluarkan statement seperti pernyataan tersebut. Sebab umat memiliki kebebasan memilih partai apapun dalam kontestasi tersebut, sesuai dengan kadar kepercayaan umat terhadap partai tersebut. Dan sekali lagi bagi Cak Nur hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kadar keislaman atau keimanan. Apalagi saat itu partai Islam tampil dengan kesan yang tidak menarik dan tidak mengcover sepenuhnya

aspirasi umat. Maka karena kondisi-kondisi tersebut bagi Cak Nur, *Islam, Yes. Partai Islam, No.*⁵²

Selain dicetuskannya jargon yang kontroversial tersebut, tahun 1970-an menjadi tahun di mana pemikiran Cak Nur terkait politik Islam terbilang cukup kritis dan masif. Di tahun yang sama Cak Nur juga merumuskan konsep yang disebutnya dengan istilah “Sekularisasi Islam” di mana sama halnya dengan respon yang dialami Cak Nur sebelumnya, konsep ini pun tak luput dari sasaran tembak kalangan yang salah kaprah dalam memahaminya. Masih dengan alasan yang serupa (dengan latarbelakang dicetuskannya *Islam, Yes. Partai Islam, No?*), digaungkannya konsep sekularisasi Islam ialah dikarenakan Cak Nur melihat pada situasi bangsa yang hidup di era pembangunan, mayoritas umat Islam masih hidup berdampingan dengan penyakit TBC atau dalam kepanjangannya dikenal dengan Takhayyul, Bid’ah dan Khurafat. Penyakit-penyakit ini yang menurut Cak Nur membuat mayoritas umat Islam di Indonesia tidak bisa berkembang mengikuti era (apalagi modernisasi dan globalisasi sedang pesat-pesatnya) sehingga menjadi tertinggal dari kalangan yang lain. Karena adanya kekaburan dalam melihat Islam (disebabkan penyakit TBC tadi) sehingga kalangan Islam menjadi susah membedakan persoalan-persoalan yang bersifat ukhrawi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya masuk ke ranah duniawi.⁵³ Percampuran dan bahkan salah menempatkan posisi antara persoalan ukhrawi dan duniawi inilah yang kemudian menggerakkan Cak Nur untuk merumuskan konsep sekularisasi Islam. Jadi sekularisasi Cak Nur bukanlah memisahkan agama dan negara sepenuhnya, namun terletak pada perlu adanya kesadaran dan kemapanan untuk mampu membedakan letak atau posisi dari duniawi dan ukhrawi karena percampuran antara kedua hal tersebut tanpa ada kemapanan dan kesadaran

⁵² Muhammad Yusuf dan Jun Mawalidin, “Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia,” *Politica : Jurnal Hukum tata negara dan politik Islam* 9, no. 1 (t.t.): 75.

⁵³ Lukman Nulhakim, “Konsep Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Madjid Sebuah Fenomenologi Agama,” *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (t.t.): 256.

intelektual, akan berdampak buruk dalam kehidupan dan juga dalam pemahaman mengenai Islam itu sendiri. Konsep inilah yang menurut Budhy Munawar Rachman sebagai bentuk pengartikulasian Cak Nur terhadap konsekuensi logis dari tauhid.⁵⁴

Pada bagian pengantar yang ditulis oleh Budhy Munawar Rachman dalam buku kumpulan karya Cak Nur, beliau mengatakan bahwa memang pada sekitar tahun 1965-1978 pemikiran Cak Nur terfokus kepada perdebatan tentang sekularisasi dan pembaruan Islam. Sementara pada tahun-tahun setelahnya, yaitu tahun 1984-2005 Cak Nur cukup intens menyoroti persoalan integrasi keislaman dan keindonesiaan. Menurut Cak Nur, dalam lingkup Islam, hal yang paling tidak bisa diingkari oleh kaum Muslim ialah pertumbuhan dan perkembangan Islam seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik. Dalam hal historis Islam awal, Cak Nur mengakui bahwa semenjak hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah hingga saat ini, Islam telah menampakkan diri sangat terkait dengan masalah sosial-politik, terutama terkait persoalan hubungan agama dan negara.⁵⁵

Lewat peristiwa tersebut kemudian membentuk pemikiran Cak Nur bahwa adanya suatu tatanan sosial-politik dalam tubuh Islam yang bukan diperintah atas kemauan pribadi, namun bersama-sama membentuk masyarakat yang partisipatif-egaliter yang disebut Bellah dengan istilah *nasionalisme-partisipatif-egaliter*. Dengan menggunakan sudut pandang historis, Cak Nur memahami bahwa Islam memberi ilham kepada umatnya dalam persoalan sosial-politik dan telah memberi kelonggaran besar terkait pengaturan teknis atas masalah sosial-politik tersebut. Cak Nur sendiri mencoba merelevansikan piagam Madinah dengan konteks Indonesia yaitu dengan langkah menganalogkan Pancasila dengan Piagam Madinah sebagai bentuk *common platform* atau yang disebut Cak Nur dengan istilah kalimatun sawa. Cak Nur mengaitkan nilai-nilai Islam yang

⁵⁴ Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan*, lviii.

⁵⁵ Madjid, lxvi.

terkandung di dalam Piagam Madinah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai strategi penerimaan paham Indonesia yang modern.⁵⁶

Langkah-langkah Cak Nur terkait dengan perkembangan konsep modernisme Islam, paham Inklusif atau yang dikenal dengan Pluralisme, kemudian pemikiran terkait humanisme Islam dan konsep reformasi yang di dalamnya terkandung nilai demokrasi dan *civil society* pada sekitar tahun 1984-2005 menampilkan bahwa Cak Nur adalah sosok intelektual Islam Indonesia yang eksis dan pemikirannya terus berkembang seiring zaman serta aktif merespon tantangan dan persoalan yang terjadi di Indonesia bahkan hingga beliau tutup usia di tahun 2005. Langkah yang diambil Cak meskipun sejak tahun 70-an sudah mendapatkan respon negatif dari beberapa kalangan, namun jelas memperlihatkan bahwa Cak Nur menaruh kepedulian yang besar terkait dengan perkembangan pemikiran Islam, agar Islam bisa terus bereksistensi dan eksis di kalangan masyarakat Indonesia.

⁵⁶ Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, ccv.

BAB III

RELASI AGAMA DAN POLITIK

A. Relasi Agama dan Politik Secara Umum

Berabad-abad yang lalu, agama muncul sebagai cahaya harapan dan sandaran manusia dalam memaknai kekuatan di luar manusia yang punya ikatan begitu eratnya dengan alam tempat manusia itu menggantungkan kehidupan mereka. Melintasi ruang dan waktu, di zaman kuno, abad pertengahan hingga kini, agama kemudian merasuk ke dalam segala penjuru mata angin kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan ke dalam aspek politik dan lainnya. Dalam karya sejarah manapun kita bisa melihat bahwa di seluruh lapisan masyarakat, baik itu warga biasa maupun pada tingkat penguasa, semuanya ingin membawa serta menjadikan agama sebagai dasar dari apapun yang mereka lakukan, berdasarkan dengan kepentingan mereka masing-masing.⁵⁷ Dengan meleburnya agama ke dalam kehidupan manusia, bersamaan dengan itu pula terbangun suatu struktur hubungan antara agama dengan politik dikarenakan politik sendiri ialah suatu konsep yang juga menaungi gerak manusia di muka bumi.

Relasi ini dapat kita lihat dalam sejarah manakala digunakannya agama sebagai acuan para penguasa dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan bentuk sakralnya agama, para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa pemerintahannya merupakan sebuah misi suci keagamaan dan oleh karena itu, siapapun yang menolak ataupun memberontak pemerintahan akan tergolong sebagai musuh agama.⁵⁸ Musuh negara dicap sebagai musuh Tuhan dan sesat sehingga perlu untuk dijatuhi hukuman berat atau bahkan diperangi. Narasi ini

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

⁵⁸ Ahmad Ali Nurdin, *Agama dan Politik* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019).

bukan hanya sekadar narasi tak berdasar belaka, namun jelas adanya terpampang dalam lembar sejarah. Banyak catatan yang bisa kita temukan terkait kuasa agama dalam hal politik kenegaraan yang akhirnya berujung pada kondisi tragis. Salah satu contoh yang paling fenomenal dalam sejarah agama dan politik adalah konsolidasi kekuatan gereja di awal abad pertengahan sekitar 500-1500 M, di mana terbentuknya suatu institusi hukum kepausan yang berperan dalam pembasmian kaum *heretics* yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari doktrin gereja. Orang atau kelompok yang dicap sebagai *heretic* akan mendapatkan perlakuan yang cukup keras, seperti dikucilkan, didesak untuk pindah dan yang paling parah adalah dijatuhi hukuman-hukuman yang sangat mengerikan dan berujung pada penghilangan nyawa.⁵⁹

Di Spanyol misalnya, pada sekitar tahun 1478 M dibentuklah inquisisi secara sah oleh Paus Sixtus IV dikarenakan banyak penganut Yahudi dan Islam yang dipaksa untuk pindah agama dan kemudian masih mempraktikkan ritual agama lama mereka. Inquisisi ini memakan begitu banyak korban, bahkan dalam jangka waktu setahun saja, terhitung ada 300 korban yang dibakar hidup-hidup. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, jumlah korban semakin meningkat dan inquisisi ini baru diberhentikan pada sekitar tahun 1820 M.⁶⁰ Inquisisi yang terjadi di Spanyol dan di belahan negara lain benar-benar merupakan peristiwa yang begitu menggegerkan dalam sejarah agama, sebab hal ini tentu dengan jelas dilakukan atas dasar semacam *pembersihan* terhadap orang atau pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari doktrin agama. Meskipun seorang tokoh Kristen menyatakan bahwa “*The inquisition is an institution for which the Church has no responsibility.*” (Inquisisi adalah suatu institusi di mana Gereja tidak memiliki tanggungjawab untuk itu.) namun para peneliti termasuk Karen Armstrong meyakini bahwa persekusi kaum *heretics*,

⁵⁹ Dewi Rofiqoh, “Dinamika Perkembangan Matematika Dari Abad Pertengahan Hingga Ke Gerakan Renaissance dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Matematika di Sekolah” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

⁶⁰ Husaini Adian, “Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat,” *Jurnal KALIMAH* 1, no. 2 (2013): 194.

Yahudi, Islam dan lainnya merupakan suatu tindakan keji yang didasari oleh agama. Noda merah dalam sejarah ini jelas bukan semata tercoreng atas dasar agama saja. Namun ada latar belakang yang begitu kompleks dan berujung pada titik hegemoni politik. Pada intinya, pihak gereja ingin mempertahankan serta memelihara eksistensi kekuasaan politiknya sehingga dalam menjalankan itu semua mereka tahu betul bahwa ada banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi, seperti menyingkirkan pihak yang dianggap mengancam dengan segala macam cara.⁶¹ Tentu ini bukanlah sejarah yang patut untuk dibanggakan sehingga pada abad-abad setelahnya, pihak gereja kemudian menyampaikan pernyataan maaf kepada korban dari sejarah inquisisi yang mengerikan itu.

Konflik terkait hubungan agama dan politik tentu bukan hanya terjadi pada satu agama saja. Agama Islam pun tak lepas dari masa kelam, di mana terjadi pertikaian antar sesama yang diakibatkan oleh latar belakang politik. Peristiwa al-Fitnah al-Kubro tentu bukan istilah baru bagi umat Islam. Dalam sejarah Islam awal, meskipun peristiwa itu terjadi jauh setelah Nabi wafat, al-Fitnah al-Kubro tetaplah menjadi noda merah yang mengotori kesucian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.⁶² Telah dibahas di mana-mana bahwa pada detik-detik masa kepemimpinan Utsman bin Affan, Khulafaurrasyidin yang ke-3 ini, pergolakan politik terjadi secara besar-besaran bahkan berimbas pada terjadinya perang saudara, baik antara pihak Ali bin Abu Thalib dengan pihak keluarga Utsman yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan dalam perang Siffin, maupun yang paling mencengangkan adalah terjadinya pertikaian antara Aisyah binti Abu Bakar, seorang putri dari Khulafaurrasyidin Pertama yang menggantikan kepemimpinan pasca Nabi wafat sekaligus salah seorang istri yang dicintai oleh Nabi berperang melawan Ali bin Abu Thalib yang merupakan anak dari paman Nabi, Abu Thalib dan sekaligus suami dari

⁶¹ Mikael Eskelner, *Kekristenan di Periode Ante-Nicene, Bapak Gereja, dan Penganiayaan Terhadap Orang Kristen*, vol. 2 (Cambridge Stanford Books, 2021).

⁶² Khairul Ramadhan, "Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila ditinjau Dari FIqh Siyasah" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Fatimmah binti Muhammad yang merupakan putri tercinta Nabi, keduanya terlibat dalam perang Jamal.⁶³ Meski pada akhirnya Khulafauryyidin ke-4 itu kemudian terbunuh pada tahun ke 4 kepemimpinannya, kekacauan politik dalam sejarah Islam tak padam sepenuhnya. Bahkan menjadi semakin membara hanya karna keinginan untuk memperebutkan kekuasaan yang pada masa sebelumnya telah dibangun Nabi dengan semangat kasih sayang dan perdamaian. Karena peristiwa berdarah seperti inilah yang kemudian melahirkan berbagai perpecahan dalam tubuh umat Islam sendiri menjadi beberapa aliran teologi. Fakta sejarah seakan memperlihatkan kepada kita bahwa hubungan antara agama dan politik seringkali berujung kepada kekacauan dan pertikaian.

Namun tentu saja hubungan agama dan politik juga bukan hanya berwarna gelap semata. Sebab dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam sendiri, peran politik nampak begitu kental dan penting. Apalagi ketika Nabi Muhammad kemudian membangun kekuatan politiknya setelah hijrah ke Madinah.⁶⁴ Kalau kita melihat jauh sekali ke belakang, 150 tahun sebelum Nabi Muhammad membangun suatu struktur persatuan umat yang kuat dan besar, kita akan mendapati fakta bahwa Qushayi bin Killab terlebih dahulu telah membangun citra politik yang begitu kuat di kota Makkah. Qushayi yang merupakan moyang dari Nabi Muhammad memainkan peran yang begitu besar dalam membangun suatu pemerintahan yang sangat berpengaruh di Ibukota suci ini. Fakta ini jelas tak bisa kita nafikan begitu saja, sebab kalau dirunut, sejarah ini yang nantinya akan mempengaruhi peran Nabi dalam membangun kekuatan politiknya di kota Mekah. Menurut Khalil Abdul Karim dalam bukunya *Quraissy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah* yang dalam versi terjemahannya berjudul *Hegemoni Quraissy : Agama, Budaya,*

⁶³ Harianto Budi dkk., "Islam, Agama dan Politik Lintasan Sejarah," *ISLAMIC LAW : JURNAL SIYASAH* 7, no. 2 (2022): 7.

⁶⁴ Fajar, Fajar, "Praksis Politik Nabi Muhammad SAW (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan)," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83.

Kekuasaan, dijelaskan bahwa memang dalam proses tumbuh dan berkembangnya Islam, Nabi Muhammad melewati jalan yang tidak mudah. Ada banyak pertentangan, pertikaian serta kekerasan yang diterima oleh Nabi. Namun jika kita melihat dari sisi citra politik di kota Mekah, sebenarnya Nabi Muhammad sudah punya posisi yang cukup kuat di mana posisi inilah yang telah diwariskan oleh Qushayy bin Killab dan turunannya. Qushayy lah yang berjuang dari dasar dalam membangun posisi politik dan pemerintahan Quraisy yang dominan di kota Mekah.⁶⁵ Sehingga pada masa selanjutnya, dalam proses penyebaran agama Islam yang bagi Watt membutuhkan langkah politik, Nabi kemudian tidak membangun citra politik dari awal tetapi cukup melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh moyangnya dan memperkuat posisi dalam politik di kota Mekah dan sekitarnya.

Pada tahun-tahun setelahnya, tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, gerakan politik yang dilakukan oleh Nabi nampak jelas terlihat. Sekalipun yang ditonjolkan dalam sejarah ialah awal kedatangan Nabi ke Madinah tanpa embel-embel politik, namun faktanya Nabi jelas memahami bahwa untuk memperkuat eksistensi agama yang disebarkannya, dirinya dan kaumnya maka perlu untuk mengambil langkah politis dalam hal itu. Salah satu langkah politis yang paling fenomenal dalam sejarah Islam awal adalah dibuatnya perjanjian tertulis antara kaum Muhajirin, Anshar dan orang-orang Yahudi Madinah kala itu.⁶⁶ Konsep perjanjian seperti ini dalam politik dinamakan dengan istilah kontrak sosial. Perjanjian ini yang kemudian melahirkan suatu kekuatan umat yang besar di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Keadaan politik inilah yang dalam sejarah diakui oleh beberapa kalangan dalam Islam sebagai suatu contoh nyata Negara Islam.

⁶⁵ Khalil Abdul Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002).

⁶⁶ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1995).

B. Relasi Politik dan Agama di Indonesia

Latar belakang relasi antara agama dan politik di Indonesia sendiri punya corak yang cukup unik. Kalau kita melihat terkait teori masuknya Islam di Indonesia tentu ada beragam konsep yang akan kita jumpai. Begitu juga dalam hal persebaran Islam di Indonesia. Memang menurut sudut pandang peneliti terkait jalur persebaran yang paling ideal adalah lewat jalur akulturasi dengan budaya dan agama yang sudah ada sebelumnya. Namun fakta menarik terkait jalur yang paling cepat dalam persebaran agama Islam di Indonesia adalah lewat jalur politik. Di Indonesia yang kala itu sistem pemerintahannya masih berbentuk kerajaan, kadangkala ketika persebaran Islam masuk ke dalam lingkup kerajaan, maka secara bersamaan Islam pun akan dianut oleh rakyat sekitar. Ini dikarenakan ketika seorang raja memeluk Islam, dengan pengaruh kekuatan politiknya, ia mampu memaksakan seluruh rakyat untuk ikut memeluk agama Islam. Kondisi seperti ini dapat kita temui dalam sejarah persebaran Islam di Maluku dan Sulawesi.⁶⁷ Di wilayah lain seperti Sumatera dan Jawa, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memutuskan untuk memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Dan pada beberapa perang yang terjadi, kerajaan Islam menang sehingga pada akhirnya kerajaan yang kalah beserta rakyatnya secara terpaksa harus memeluk agama Islam.

Sementara jika kita berjalan maju sedikit ke depan, pada masa penjajahan Belanda, ada suatu sentimen yang lahir dari para pemuka Islam bahwa umat muslim yang berkecimpung dalam hal politik di bawah pemerintahan kolonial dianggap sebagai *kafir indianas* atau setengah kafir dikarenakan berhubungan dekat dengan pihak Belanda yang dicap kafir. Para pemuka pesantren atau ulama lokal saat itu menganggap bahwa uang yang dihasilkan seseorang dari proses mencari nafkah dengan bekerja di bawah pemerintah Belanda adalah uang haram yang jika digunakan maka tidak akan mendapatkan manfaat apa-

⁶⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyyah II* (Depok: Rajawali Press, 2017).

apa. Dalam buku *Islam dalam Arus Sejarah di Indonesia* karya Jajat Burhanudin diceritakan pengalaman Achmad Djajadiningrat seorang elit pribumi dari keluarga Djajadiningrat di Banten saat menempuh pendidikannya di pesantren. Achmad menyatakan bahwa ia kerap kali dicemooh oleh pimpinan pesantren karena latar belakang profesi keluarganya itu. Seorang pimpinan pesantren (lurah) mengatakan kepadanya bahwa ia akan sulit memahami pelajaran yang didapatkannya di pesantren karena makanan yang ia konsumsi dibeli dari hasil uang haram yang diperoleh ayahnya dari pemerintah belanda. Peristiwa sejarah ini memperlihatkan kondisi lanskap politik di Indonesia masa penjajahan pada akhir abad ke-19 yang menampilkan kesenjangan yang terbuka lebar antara pihak ulama yang berkonsentrasi pada pembentukan komunitas Muslim (Santri) dengan kelompok aristokrat yang dianggap jauh dari agama dikarenakan jabatan yang dijalankan langsung di bawah pemerintahan belanda.⁶⁸

Fenomena ini nampak berbeda di masa-masa setelahnya di mana muncul suatu kesadaran untuk memperkokoh kelompok keagamaan di era penindasan kebebasan dengan cara membentuk suatu pergerakan atau organisasi politik. Salah satu pergerakan politik bercorak Islam tertua di Indonesia adalah Sarekat Islam (SI) yang pada mulanya didirikan di Solo sekitar tahun 1911 M oleh H. Samanhudi dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI awalnya merupakan organisasi ekonomi yang dibangun atas dasar perjuangan melawan pedagang Cina yang mendominasi pasar. Pada saat yang sama SDI juga memiliki motif untuk melawan Belanda atas sikapnya yang membuka jalan lebar bagi pedagang Cina untuk memonopoli perekonomian kala itu dan menggeser posisi pribumi yang mengakibatkan pihak pribumi mengalami kerugian. Pada sekitar tahun 1912 M, SDI kemudian diganti menjadi SI dan pada perjalanannya, organisasi ini kemudian menemukan pemimpin yang

⁶⁸ Jajat Burhanudin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

sangat kompeten yaitu HOS Tjokroaminoto (1833-1934). Di sinilah bermulanya motif politik dalam pendirian suatu organisasi Islam.⁶⁹

Tjokroaminoto mengubah arah SI menuju perjuangan pemerintahan bagi rakyat Indonesia yang setidak-tidaknya diberi kebebasan dan hak suara dalam persoalan-persoalan politik kala itu. Namun perjalanan organisasi politik Islam tertua ini tentu tidak selalu berjalan mulus. Dalam suatu wadah yang menampung ragam manusia beserta pandangan yang cenderung berbeda satu dengan lainnya, nyatanya akan berhadapan dengan konflik akibat perbedaan ideologi. Yaitu pada puncak perbedaan ideologi di dalam tubuh SI, melahirkan ideologi yang cukup terkenal dalam sejarah Indonesia yaitu Komunisme. Pemisahan tokoh-tokoh SI yang berpegang pada ideologi komunis menjadi awal baru dari berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1923 M. Dengan begitu, tokoh-tokoh yang masih tersisa di dalam tubuh SI kemudian semakin mempertegas bahwa mereka berdiri di atas ideologi Islam. Namun, selain pemisahan kalangan yang berideologi komunis dari SI, ada juga satu kalangan yang kemudian ikut memisahkan diri dari SI, yaitu kalangan yang kecewa dengan perpecahan tersebut sehingga pada akhirnya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927.⁷⁰

Selain Sarekat Islam yang fenomenal, dalam perjalanan Islam historis di Indonesia terdapat juga beberapa pergerakan politik berbau Islam yang lahir dari kesadaran nasionalisme. Misalnya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang merupakan organisasi Islam yang pada awalnya dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 M untuk menggantikan organisasi yang sebelumnya sudah ada, bernama MIAI dengan kepanjangan Madjelis Islam A'la Indonesia. Pergerakan ini berisikan tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan lainnya yang kemudian juga berjuang dalam merebut kemerdekaan bangsa. Masyumi pada tahun-tahun

⁶⁹ Ismail Usman, "Sarekat Islam (SI) : Gerakan Pembaruan Politik Islam," *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (t.t.): 47.

⁷⁰ (Depok: Rajawali Press, 2017) 260.

setelahnya kemudian bermetamorfosis menjadi salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki massa yang cukup besar.⁷¹ Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tokoh kebanggaan di Masyumi adalah Mohammad Natsir, seorang tokoh bangsa yang banyak menuangkan aspirasinya terkait Negara Islam. Bagi Natsir, Islam bukan hanya sebatas pada ritual-ritual ruhaniah yang menggambarkan hubungan manusia dengan sang pencipta, namun Islam lebih luas mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan makhluk sesamanya. Sebagai sebuah dasar dalam berkehidupan, menurut Natsir, Islam tentu tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan politik. Pemikiran ekstrim Natsir ini yang kemudian banyak ditentang oleh berbagai pihak termasuk di antaranya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Begitu banyak sejarah terkait hubungan politik dan agama di Indonesia pra kemerdekaan. Tentu pada saat memasuki masa-masa kemerdekaan dan masa setelahnya lantas tidak membuat persoalan terkait hubungan politik dan agama di Indonesia memudar atau bahkan hilang. Justru yang nampak adalah semakin membaranya kondisi terkait peran agama (Islam) dalam pergulatan politik di negara yang baru berdaulat itu. Ini dimulai saat para *Founding Father* berunding terkait dasar negara atau ideologi yang nantinya akan digunakan sebagai *Way of Life* bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan negara-bangsa yang ideal. Beberapa tokoh dari SI dan Masyumi seperti Agus Salim dan Mohammad Natsir tentu berperan dalam menyuarakan aspirasi terkait masa depan bangsa Indonesia. Kedua tokoh ini mengusulkan bahwa baiknya Islam digunakan sebagai dasar negara Indonesia.⁷² Pun ada berbagai usulan seperti menetapkan aturan bahwa presiden haruslah beragama Islam. Usulan-

⁷¹ Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, dan Ahmad Bajuri, "Partai Masyumi : Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia 1945-1960," *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 6, no. 1 (t.t.): 28.

⁷² Suardi Kaco dan Sumarni, "Gerakan Islam di Indonesia: Sejarah Fundamentalisme dan Radikalisme Dari Era Kolonial Hingga Pasca Reformasi," *CARITA : jurnal Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (2024): 5.

usulan ini meskipun mendapatkan penolakan yang cukup keras dari berbagai pihak namun setelah melewati proses perundingan, maka pada akhirnya perdebatan ini mencapai bentuk mufakat dengan ditandatanganinya rancangan *preamble* yang ramai dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Meskipun pada awalnya rancangan ini disepakati bersama, namun pada beberapa hari setelahnya, 7 kata yang terkandung dalam Sila Pertama Piagam Jakarta ini kemudian diputuskan untuk dihapus atas berbagai pertimbangan. Beberapa pihak yang merasa keberatan menganggap bahwa, “*kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” adalah 7 kata yang hanya memuat nilai-nilai berdasarkan satu agama saja, sementara di Indonesia yang begitu luas, tersebar berbagai agama dan keyakinan yang lain. Ini berarti dengan digunakannya 7 kata tersebut dalam Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai dasar negara tentu mendiskriminasi pemeluk agama lain yang juga sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.⁷³

Ini adalah momen paling khas dalam sejarah Indonesia yang menampilkan bagaimana usaha pihak Islam untuk memunculkan kekuatan politik yang berdasar pada “*Syariat*” Islam di negara yang majemuk dan beragam, bukan hanya sebagai salah satu kekuatan politik namun menjadi satu-satunya kekuatan politik dan hukum yang menaungi pemerintahan negara baru itu. Pada saat yang sama sejarah pun mencatat bahwa usaha itu mengalami kegagalan dengan dihapusnya 7 kata dalam piagam Jakarta. Meskipun pihak Islam mengakui bahwa keputusan itu lahir dari kebesaran hati mereka serta kesadaran akan kewajiban mempertahankan persatuan, namun atas kegagalan tersebut situasi umat Islam dalam persoalan politik bisa dibilang seperti api dalam sekam. Di tambah lagi dengan isu yang marak tersebar di mana-mana terkait keinginan pemeluk agama terbesar di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Khilafah atau negara Islam seperti yang menurut

⁷³ Muhammad Rais Ahmad, “Sebuah Pertanyaan Sejarah : Tela’ah awal mengenai Dasar negara Indonesia yang baru berdiri,” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 291.

pihak mereka dicontohkan oleh Nabi SAW di Madinah. Keinginan ini tentu saja ditolak, sebab di masa kini kita bisa merasakan dengan jelas bahwa Indonesia terbentuk sebagai negara yang tidak hanya terpaku pada syariat satu agama saja namun begitu toleran terhadap keragaman agama yang ada. Ini didasari oleh Pancasila yang diputuskan menjadi ideologi negara bangsa. Pancasila sendiri menurut para tokoh bangsa seperti Mohamad Roem, Nurcholish Madjid dan kawan-kawan penerus seperti Yudi Latif dan lainnya, ialah suatu representasi yang terkandung di dalamnya nilai-nilai keagamaan yang begitu kental. Pada kenyataannya Pancasila merupakan bentuk kristalisasi dari nilai universal agama. Sebab ditiap silanya tentu saja tidak ada yang bertentangan dengan nilai agama manapun yang tersebar diseluruh semesta. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerukunan, kebijaksanaan serta keadilan tentu saja merupakan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam tiap agama yang ada.⁷⁴

Dalam teori Watt terkait relevansi agama dan politik dikatakan bahwa dalam memandang bagaimana hubungan antara agama dan politik, poin utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah nilai universal agama bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan sebagai landasan dalam berperikehidupan di suatu masyarakat atau negara.⁷⁵ Sementara dalam bukti nyata di Indonesia, kita sendiri bisa mengakui bahwa tidak adanya pertentangan antara ideologi negara bangsa yang digunakan sebagai patokan kehidupan rakyat dan negara yaitu Pancasila dengan nilai-nilai universal agama. Yang ada justru nilai-nilai universal agama melebur ke dalam ideologi bangsa tersebut. Maka dari itu, para tokoh bangsa seperti Nurcholish Madjid, Mohamad Roem, Amien Rais dan lainnya menyerukan bahwa tidak perlu adanya langkah untuk mengganti dasar negara ataupun bentuk negara yang telah final itu.

⁷⁴ Nurul Dwi Tsoraya, Masduki Asbari, dan Gunawan Santoso, "Pancasila dan Agama : Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 16.

⁷⁵ Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, 1987.

Dalam perjalanan historis politik dan Islam di Indonesia, menurut Bachtiar Effendy dalam bukunya dengan judul *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik di Indonesia* dikatakan bahwa Islam sudah lama berhadapan dengan jalan buntu. Baik pemimpin negara di era Orde lama yaitu Sukarno, dan pemimpin negara di era Orde baru yaitu Suharto sama-sama memandang bahwa partai politik yang berlandaskan Islam dapat berperan sebagai pion yang bisa merobohkan landasan negara yang nasionalis. Islam politik kerap kali dicurigai sebagai kalangan yang menentang ideologi Pancasila yang merupakan ideologi negara-bangsa. Berdasarkan ketakutan ini, kedua pemerintahan tersebut berupaya keras untuk melumpuhkan atau mungkin bisa dikatakan sebagai upaya menjinakkan partai-partai Islam di tiap era masing-masing.⁷⁶ Lewat upaya pemerintah ini, pada era-era tersebut, Islam politik kemudian berhasil dilumpuhkan baik dalam ranah konstitusional, fisik, birokrasi, lewat pemilihan umum atau secara simbolik.

Di sisi lain, kalangan Islam yang aktif berkiprah dalam politik menaruh prasangka curiga kepada kalangan pemerintah. Bagi mereka, pemerintah terlalu sering menyudutkan kalangan Islam politik sementara pada saat yang sama pemerintah malah terang-terang terlihat membuka diri kepada gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekular. Kondisi ini bahkan menampilkan kesimpulan bahwa negara menerapkan kebijakan ganda terhadap kalangan Islam, di mana pemerintah memberikan izin atas pertumbuhan dan perkembangan Islam dalam dimensi ritual Islam, namun dengan tegas tidak memberi kesempatan bagi kalangan Islam untuk berkembang dalam bidang politik. Persoalan ini jelas sekali memperlihatkan adanya ketegangan antara Islam dan ranah perpolitikan di Indonesia.

⁷⁶ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Democracy Project, 2011).

Memasuki Orde Baru dengan pengalaman peristiwa kegagalan yang sebelumnya dialami, membuat pihak Islam tak berhenti mencari celah dengan semakin memperkuat kekuatan politiknya lewat eksistensi Partai Masyumi. Meskipun pada saat itu bermunculan pemberontakan dan pergerakan yang mengusung berdirinya Negara Islam, namun bagi penulis, usaha yang dilakukan dengan cara memberontak ini terlalu ekstrim dan tidak *gentle*. Usaha yang cukup *vis a vis* dan *gentle* ditampilkan oleh Partai Masyumi lewat berbagai perannya dikancah politik orde lama. Namun tetap saja, dengan ideologi Islam ekstrim (menurut Soekarno) yang terkandung di dalam partai tersebut, dan Masyumi dianggap menentang revolusi pada masa pemerintahan Soekarno, maka pada tahun 1960 M partai Masyumi resmi dibubarkan oleh presiden pertama Republik Indonesia.⁷⁷ Tentu saja kondisi ini semakin memperlemah eksistensi Islam dalam politik di Indonesia masa orde lama.

Berbicara terkait dengan konsep atau macam-macam bentuk negara, negara Islam seringkali dihadapkan dengan lawan mainnya yaitu negara sekuler. Konsep negara sekuler dalam pengertiannya dipahami sebagai bentuk negara di mana terjadinya pemisahan antara agama yang seharusnya berada di ranah pribadi dengan persoalan politik yang jelas merupakan persoalan publik.⁷⁸ Bagi para pendukung konsep negara sekuler menyatakan bahwa dalam hal mengenai konsep kenegaraan, unsur agama tidak punya kepentingan dalam mencampuri urusan tersebut. Apalagi dengan kondisi negara dan bangsa yang semakin berubah mengikuti laju globalisasi tentu bangsa akan dihadapkan dengan persoalan yang berwajah baru, sehingga bagi kaum konservatif yang berpegang erat dalam konsep tradisional akan sulit untuk membaurkan diri bahkan menyelesaikan permasalahan yang berwajah baru tersebut. Intinya,

⁷⁷ Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)," *Thaqafiyat* 14, no. 1 (2013): 93.

⁷⁸ Abdul Basith, "Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009)ii.

bagi para penganut konsep negara sekular, isu agama semakin ke sini semakin tidak *relate* dengan perkembangan zaman.⁷⁹

Pada kenyataannya pemikiran seperti ini juga mengalami berbagai penolakan, sebab bagi beberapa pihak, agama adalah salah satu landasan utama dalam berperikehidupan. Ketika agama dipisahkan dari urusan kehidupan termasuk di dalamnya terkait persoalan kenegaraan, maka proses dalam menjalankan negara dan memelihara bangsa juga ikut kehilangan landasan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama. Kita jelas tahu bahwa nilai-nilai murni yang terkandung dalam seluruh agama di muka bumi ini sarat akan makna-makna kemanusiaan, kasih sayang dan perdamaian sehingga tentu saja tidak akan bertentangan jika dijadikan sebagai landasan dalam berkehidupan serta berkebangsaan di suatu negara. Satu-satunya problem yang ada ialah masih terdapat pihak yang kemudian menjadikan agama sebagai suatu dasar dalam memaksakan kehendak-kehendak non agamis hingga melahirkan sebuah perpecahan bahkan pertumpahan darah (sesuatu yang jelas ditentang oleh agama itu sendiri).⁸⁰

Beralih kepada relasi politik dan agama (Islam) di Indonesia di masa pasca lengsernya Presiden pertama RI, Soekarno, Indonesia kemudian memasuki era Orde Baru (Orba) yang pada saat itu, bangku kepemimpinan negara dipimpin oleh Presiden kedua yaitu Soeharto. Dalam pergolakan politik pada era Orde Lama, partai politik Islam yang dibubarkan, politikus-politikus Islam yang dihukum penjara dan beberapa ketetapan pemerintah kala itu yang begitu mempersempit ruang gerak Islam dalam politik di Indonesia, diimpikan pihak Islam akan segera selesai ketika memasuki era Orde Baru. Sehingga pada detik-detik runtuhnya Orde Lama, pihak Islam yang merasa terpinggirkan dan

⁷⁹ Costantinus Ponsius Yogie Mofun, "Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 6, no. 2 (t.t.): 320.

⁸⁰ Ali Ismail Saleh dan Wisnaeni Fifiana, "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 239.

dicurangi, diam-diam berjabat tangan dengan para dalang dibalik bangkitnya Orde Baru. Dengan kepemimpinan baru, pihak Islam kembali menumbuhkan harapan bahwa langkah mereka kali ini akan lebih dipermudahkan serta akan mendapatkan respon yang jauh berbeda dari masa sebelumnya yang bagi pihak mereka sangat jauh dari kata demokratis.⁸¹

Sementara itu, hubungan Islam dan politik di Indonesia masa Orde Baru dikelompokkan ke dalam beberapa masa oleh Kamsi yang tertuang dalam artikel ilmiahnya dengan judul *Citra Gerakan Politik Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai dengan Era Orde Baru)* yang diterbitkan dalam jurnal Millah tahun 2013. Artikel tersebut lebih kurang membahas terkait era-era di mana hubungan politik dan Islam muncul dengan berbagai model. Masa bulan madu (1966-1969 M) adalah masa pertama yang disebutkan oleh Kamsi dalam artikelnya. Pada 3 tahun pertama ini, pemerintahan Soeharto sebagai pemimpin negara kala itu terbilang cukup demokratis (terkait isu HAM, hukum dan sebagainya) serta menyediakan ruang untuk kebebasan pers seluas-luasnya.⁸² Selain itu, pemerintah Orde baru berusaha mengambil hati publik terutama kalangan Islam (Masyumi) lewat kebijakan untuk membubarkan PKI sampai ke akar-akarnya. Kebijakan ini tentu saja menarik sebab pada masa-masa sebelumnya pihak Islam (Masyumi) jelas memiliki sentiment yang cukup tajam terhadap PKI dilatarbelakangi oleh persoalan keagamaan dan tak luput juga terkait PKI yang lebih eksis menjadi kesayangan pemerintah di era Orde lama. Tentu masa ini jelas merupakan masa transisi yang begitu cerah dalam pandangan umat Islam serta mereka meyakini bahwa kondisi tersebut merupakan kesempatan emas untuk berjabat tangan dengan kepemimpinan Orde baru agar bisa

⁸¹ Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru," *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 186.

⁸² Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Orde Baru)," *Jurnal Millah* 13, no. 1 (t.t.): 133.

memulihkan eksistensi kalangan Islam di ranah perpolitikan yang dihambat habis-habisan pada era sebelumnya.

Kalangan Islam sendiri yang tergabung dalam himpunan partai Masyumi begitu mengharapkan akan adanya rehabilitasi partai mereka yang sebelumnya bubar pada masa Orde Lama. Meskipun begitu besar keyakinan akan bisa eksis kembali di era baru tersebut kemudian ditampar dengan kenyataan pahit. Pada bulan Desember 1966 M, pihak ABRI menolak pengajuan rehabilitasi tersebut dikarenakan pada masa sebelumnya Masyumi termasuk ke dalam salah satu partai yang melakukan penyelewengan terhadap UUD dan Pancasila selayaknya partai PKI. Penolakan ini tentu saja bukan kegagalan pertama bagi pihak Masyumi sebab mereka tetap membulatkan tekad untuk terus berjuang dengan mempersiapkan partai baru yang menghimpun kalangan Islam lain yang belum tergabung ke dalam beberapa partai yang telah ada. Perjuangan ini benar-benar membuahkan hasil yaitu pada tanggal 20 Februari 1968 M, berdasarkan pertimbangan Presiden, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) secara sah didirikan. Namun lagi-lagi, pihak Islam yang tergolong dalam Parmusi harus berhadapan dengan kecurangan politik. Dalam menentukan Ketua Umum partai, Soerharto mengambil alih secara tidak langsung dengan melarang beberapa pihak untuk mencalonkan diri sebagai ketua.

Bagi beberapa kalangan termasuk di dalamnya Mohamad Roem yang merasa dirinya adalah salah seorang dari kalangan yang dilarang oleh Soeharto untuk mencalonkan diri, meyakini bahwa telah terjadi ketidakadilan, dan penyelewengan dalam politik kala itu. Kondisi terkait pergolakan dalam Partai Muslimin Indonesia dengan penindasan atas kebebasan yang dilakukan oleh Presiden kedua RI sama sekali tidak mencerminkan demokrasi yang sehat sesuai dengan yang dimaksud oleh Soeharto sendiri.⁸³ Bung Hatta, Mantan Wakil Presiden pertama RI pun menyatakan bahwa saat itu keadaan Parmusi

⁸³ Roem, *Bunga Rampai Sejarah*. 40.

benar-benar sangat parah dibandingkan dengan kondisi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Masa selanjutnya adalah masa ketegangan politik antara umat Islam dan pemerintah pada tahun 1969-1989 M. Era ini merupakan era tersulit bagi kalangan Islam untuk mengekspresikan diri ke ruang publik dikarenakan persepsi liar yang tersebar di kalangan birokrasi. Lewat kekecewaan yang dialami oleh kalangan Islam di tahun-tahun sebelumnya atas kebijakan dari pemerintahan Orde baru, kalangan Islam memutuskan untuk berbalik badan dari pemerintah. Mimpi buruk politik Islam pun semakin berkembang dikarenakan dari sisi eksternal pun banyak pihak yang menganggap bahwa Islam hanya akan menghambat berjalannya pemerintahan dan bahkan Islam dianggap sebagai sebuah virus menakutkan yang hanya akan mengancam serta membahayakan ketentraman kehidupan berbangsa di Indonesia. Dari persepsi seperti inilah, lahir sentimen terhadap Islam yang ditunjukkan dalam sikap nyata yaitu pelarangan penggunaan Jilbab, dihapusnya libur pada bulan Puasa, pemeriksaan secara ketat terhadap kegiatan keagamaan yang diadakan (meskipun izin kegiatan sangat sulit didapatkan) bahkan tidak jarang beberapa kegiatan keagamaan seperti ceramah dan sejenisnya dipaksa bubar.⁸⁴

Tokoh-tokoh yang berlakon dalam pemerintahan menampilkan citra yang begitu trauma dan takut kepada pihak Islam dengan asumsi bahwa jika kalangan tersebut mendapatkan celah untuk bangkit, maka mereka akan segera menerapkan Ideologinya sendiri yang berlandaskan pada Islam dan bagi mereka yang ketakutan menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu *nightmare* bagi kelangsungan negara. Dalam masa ini, Islam masih tetap berada di bagian pinggiran, sementara politik menempati suatu posisi independen dengan sayap kekuasaan yang sangat lebar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan antara politik dan Islam di era Orde Baru

⁸⁴ Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Orde Baru)." 139.

(1969-1989 M) saling berlawanan sehingga mengalami ketegangan yang melahirkan berbagai konflik kepentingan.

Kalangan Islam yang memutuskan untuk balik badan dari pemerintah menampakkan ekspresi penolakan untuk bersama-sama bergabung ke dalam proyek pembangunan yang dicetuskan pemerintah Orde baru dengan berbagai latar belakang yang tentu diperkuat dengan alasan teologi. Contohnya saja pada era Orde baru, langkah politis yang diambil pemerintah dalam melakukan proyek pembangunan ialah membuka pintu-pintu global sehingga mulai tumbuh dan berkembang konsep modernisasi di tanah air. Dalam perkembangan tersebut, kalangan Islam menunjukkan bentuk penolakan dengan menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah konsep asing yang bisa merusak keimanan umat Islam. Hal ini di latar belakang oleh tafsiran bahwa modernisasi yang datang dari barat memiliki arti yang sama dengan westernisasi. Sementara westernisasi bagi kalangan Islam adalah momok yang menakutkan sebab erat hubungannya dengan ke kristenan. Selain itu westernisasi mengingatkan kalangan Islam terhadap masa kelam di mana penjajahan terjadi di tanah air yang dilakukan oleh kolonial barat. Penolakan modernisasi ini mempunyai efek yang sangat besar terkhususnya dalam hal politik yang kemudian mempengaruhi hubungan politik dan Islam menjadi renggang di era tersebut.

Pada era terakhir terkait relasi politik dan Islam di masa orde baru, nampaknya pihak Islam menemukan secercah harapan. Era ini di namakan dengan era bermesraan antara pemerintah dan kalangan Islam. Pada sekitar tahun 1989-1997 M, pihak Islam seakan lulus dari ujian yang dilaluinya pada tahun-tahun belakang. *Kelulusan* ini dilatarbelakangi oleh pemerintah Orba yang baru menyadari bahwa kekuatan Islam ternyata begitu potensial. Soeharto pada 25 tahun terakhir akhirnya melihat sebuah perkembangan dalam tubuh Islam baik dalam bidang sosial-ekonomi ataupun pendidikan. Perkembangan ini jelas lahir dari tercerahkannya pihak Islam yang terpinggirkan kala itu. Pihak Islam memahami bahwa usaha memunculkan diri di ranah politik

kenegaraan masa Orba adalah sebuah impian yang semu. Mereka kemudian mengubah haluan dengan melangkah pada ruang-ruang lain seperti pendidikan, ruang sosial dalam suatu bukti nyata berdirinya berbagai organisasi Islam yang berdaya saing serta menonjolkan eksistensi dalam ruang ekonomi.⁸⁵

Pemerintah Orba tentu sangat memahami upaya strategis dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Sehingga selain karena timbulnya rasa percaya pada pihak Islam, alasan selanjutnya yang melatarbelakangi akomodasi politik Islam kala itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memperoleh dukungan dari pihak Islam yang kala itu sedang tumbuh subur di ruang publik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyadari bahwa perlu adanya akomodasi terhadap politik Islam agar pergerakannya tetap berada dalam pantauan dan jalur-jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah Orba era itu.

Perubahan kondisi hubungan Islam dan politik di era ini tak luput dari peran besar satu lembaga intelektual Islam yang dikenal dengan nama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang pada awal didirikan dengan ide yang diusung oleh Imaduddin Abdurrahim untuk membentuk suatu perkumpulan dari sarjana-sarjana alumni AS. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi wadah bagi para cendekiawan Muslim untuk beramal, berkreasi, berkomunikasi dan berprestasi guna mengangkat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Memang dalam sejarahnya ICMI lahir dan berasal dari bawah bukan buatan pemerintah. Bahkan ketika ide pembuatan organisasi ini disampaikan kepada Suharto, beliau nampak menerima ide ini dengan cukup terbuka dan menyatakan kepada Habibie bahwa inilah yang sejak dulu ditunggu-tunggu olehnya yaitu kalangan Islam yang mendukung pembangunan.⁸⁶ Sejak terbentuknya ICMI sudah terlihat bahwa kekuatan kalangan Islam begitu kuat dan besar terhimpun dalam organisasi tersebut yang berarti pada era tersebut Islam bangkit dan eksis

⁸⁵ Kamsi. "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)."141.

⁸⁶ Nafis, *Cak Nur Sang Guru Bangsa*, 120.

kembali di ranah politik. ICMI memandang dengan masuknya pada posisi strategis di kalangan abangan, dakwah akan lebih mudah dilakukan yang kemudian akan memiliki pengaruh besar dilapisan masyarakat. Lewat pendirian ICMI ini yang kemudian dengan jelas memperlihatkan adanya hubungan baik antara Islam dan politik (dalam bukti nyata hubungan baik ICMI dengan Golkar) yang disebut sebagai era bermesraan pemerintah Orde baru dengan kalangan Islam. ICMI merasuk ke berbagai tempat di pemerintahan lewat partai politik hingga bisa lolos sampai ke dalam lingkup DPR. Bukan hanya sampai di situ, pengaruhnya pun masuk sampai ke kalangan militer hingga dikenal sebagai era penghijauan kabinet Suharto. Bahkan pada era keruntuhan pemerintahan Suharto hal tersebut juga tak lepas dari pengaruh ICMI yang masuk ke dalam kalangan mahasiswa. ICMI jelas merupakan satu-satunya Lembaga Intelektual Islam di Indonesia yang bangkit dari bawah dan punya kekuatan magis dalam mengubah nasib kalangan Islam bahkan juga nasib bangsa Indonesia.⁸⁷

Dalam sejarah Indonesia, relasi antara politik dan agama terus mengalami fase naik turun, saling berlawanan namun pada masa selanjutnya mulai saling berkolaborasi. Ada berbagai macam latar belakang dan alasan yang membuat hubungan politik dan agama (Islam) dalam sejarah di Indonesia menjadi begitu kompleks atau menurut penulis, hubungan antara politik dan Islam di Indonesia bisa secara gamblang disebut sebagai *love-hate relationship*. Bagi peneliti, lahirnya sebuah *hate relationship* antara politik dan Islam sebenarnya dilatarbelakangi oleh kebingungan pihak Islam dalam mewujudkan konsep negara Islam/Khilafah di Indonesia. Konsep negara Islam yang menampilkan citra homogen, tentu saja akan melahirkan konflik jika diterapkan di Indonesia yang pada kenyataannya merupakan negara yang majemuk yang memiliki beragam agama serta keyakinan.

⁸⁷ Ilham Muhammad Nurjaman, Samsudin Samsudin, dan Sulasman Sulasman, "Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional," *Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (t.t.): 66.

Konsep negara Islam sendiri sebenarnya tidak lahir sejak dahulu sekali bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, namun konsep ini adalah konsep kenegeraan yang baru dikenal umat Islam di Indonesia pada masa kolonial, tepatnya pada masa runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani dalam Perang Dunia I sekitar abad ke-20. Dalam kacamata Van Bruinessen yang dipaparkan Dr. Abdul Aziz, MA dalam bukunya *Chieftdom Madinah : Salah Paham Negara Islam* dijelaskan bahwa kekalahan Kekaisaran Ottoman mengakibatkan kapal-kapal Belanda dan Inggris enggan untuk berlayar di Jeddah sehingga hal ini mempengaruhi perjalanan haji dari Indonesia bahkan pada catatan sejarah sekitar tahun 1915 M tak seorangpun jamaah dari Indonesia melaksanakan ibadah haji. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1919 M.⁸⁸ Pada tahun setelahnya, Jeddah sudah bisa dilayari sehingga begitu banyak jamaah haji dari Indonesia yang ingin menjalankan ibadah haji sekaligus menaruh minat yang besar pada persoalan perang yang terjadi kala itu pun terkait kekhalifahan kaum Muslim. Pada periode yang sama juga, dikalangan umat Islam Indonesia banyak bermunculan organisasi berbasis Islam seperti Muhammadiyah, SI (Sarekat Islam), Al-Irsyad serta beberapa organisasi lain. SI pada saat itu terpecah menjadi 2 kubu yaitu SI Merah yang berideologi kiri sementara SI Putih yang masih mempertahankan ideologi Islam. Kondisi perpecahan ini membuat SI Putih kehilangan sedikit eksistensinya sehingga tokoh-tokoh yang tergabung dalam SI Putih berusaha untuk memperkuat kembali kekuatan mereka dengan langkah memprakarsai semangat kerakyatan dan pembebasan diri dari penjajahan. Pergerakan ini bukan hanya menghimpun umat Islam di Indonesia namun diseluruh belahan bumi. Lambat laun pergerakan ini kemudian semakin menjurus kepada pembahasan terkait persoalan kekhalifahan dan berujung pada terlaksananya Kongres al-Islam Hindia yang pertama di Cirebon 1922 M yang diinisiasi oleh

⁸⁸ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah : Salah Paham Negara Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Alvabet, 2011) 109.

2 tokoh bangsa, HOS Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Sejarah ini yang merupakan awal mulanya kesadaran umat Islam Indonesia akan konsep negara Khilafah. Pada masa-masa setelahnya terjadi berentetan diskusi terkait dengan konsep negara Islam yang memicu tumbuhnya benih-benih ideologi negara Islam di kalangan Intelegensia Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos : Wacana Ilmu, 1999.
- Adian, Husaini. "Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat." *Jurnal KALIMAH* 1, no. 2 (2013): 194.
- Ahmad, Muhammad Rais. "Sebuah Pertanyaan Sejarah : Tela'ah awal mengenai Dasar negara Indonesia yang baru berdiri." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 291.
- Al-Farisi, Leli Salman. "Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler." *Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 23.
- Al-Fikri, Muchsin, Fauzi Ismail, Siti Nurjanah, dan Rifki Rosyad. "Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik." *BUANA KOMUNIKASI : Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (t.t.): 160.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah : Salah Paham Negara Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Alvabet, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam : Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Basith, Abdul. "Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia." UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Basri, Muhammad Ridha. "Dilema Negara Sekuler Prancis : Di antara Tarikan Islamophobia dan Fundamentalisme Agama." *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (t.t.): 149.
- Budi, Harianto, Nurul Syalafiyah, Rona Merita, dan Asmaul Husna. "Islam, Agama dan Politik Lintasan Sejarah." *ISLAMIC LAW : JURNAL SIYASAH* 7, no. 2 (2022): 7.
- Burhanudin, Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Democracy Project, 2011.
- Eskelner, Mikael. *Kekristenan di Periode Ante-Nicene, Bapak Gereja. dan Penganiayaan Terhadap Orang Kristen*. Vol. 2. Cambridge Stanford Books, 2021.
- Fajar. "PRAKSIS POLITIK NABI MUHAMMAD SAW (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern dan Ketatanegaraan)." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83.
- Fauzi. *Politik Islam : Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam Indonesia*. 1 ed. Bintan: STAIN SAR PRESS, 2022.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera AntarNusa, 1995.
- Hajam, dan Theguh Saumantri. "Meretas Ketegangan Relasi Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Rusydiah : Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (t.t.): 191.

- “HAUL CAK NUR KE #13 #OrasiBudaya Yudi Latif.” Diakses 21 Januari 2025.
<https://youtu.be/YDWbazEERNc?si=-fvO8F7DzySHKFjh>.
- Hawi, Akmal. “Prinsip-prinsip Islam Tentang Demokrasi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019): 108.
- Huda, Imam Walid Asrofuddin Ulil, Zia Hulhak, dan Ahmad Bajuri. “Partai Masyumi : Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia 1945-1960.” *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 6, no. 1 (t.t.): 28.
- Irfani, Kholid. “Politik Hukum : Relasi Antara Politik, Hukum dan Politik di Indonesia.” *Jurnal Politik Walisongo* 4, no. 1 (2022): 22.
- Ismail, Faisal. *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi Dalam Islam*. Jakarta Barat: PT Lasswell Visitama, 2010.
- Jainuddin. “Islam dan Politik Orde Lama : ‘Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno.’” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 226.
- Jawahir, Muhammad. “Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Kaco, Suardi, dan Sumarni. “Gerakan Islam di Indonesia: Sejarah Fundamentalisme dan Radikalisme Dari Era Kolonial Hingga Pasca Reformasi.” *CARITA : jurnal Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (2024): 5.
- Kamsi. “Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Orde Baru).” *Jurnal Millah* 13, no. 1 (t.t.): 133.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy : Agama, Budaya, Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002.
- Karya-Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. 1 ed. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020.
- Khaeroni, Cahaya. “NURCHOLISH MADJID (1939-2005) (Gagasan-Gagasan Pembaruan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia).” *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (t.t.): 181.
- Kurniawan, Rusli. “Hubungan Agama dan Politik Dalam Pandangan Hassan Al-Banna dan Relevansinya di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa : Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Ma’arif, Samsul. “Relasi Agama dan Politik Menurut Rawls.” *Jurnal Filsafat* 16, no. 2 (t.t.).
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- . *Karya Lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020.
- Madjid, Nurcholish, Jalaludin Rahmat, Ali Audah, M. Amin Rais, Ahmad Syafii Ma’arif, Lukman Harun, M. Dawam Rahardjo, dan Quraisy Syihab. *Satu Islam : Sebuah Dilema*. Bandung: Mizan, 1986.

- Mofun, Costantinus Ponsius Yogie. "Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 6, no. 2 (t.t.): 320.
- Muflihudin. "Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Muhammad, Imran. "Moralitas dalam Perjalanan Sejarah Islam." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10, no. 4 (2020): 722.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. *Cak Nur Sang Guru Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- . "Institusionalisasi Pemikiran Cak Nur : Yayasan Wakaf Paramadina dan Masjid Madinatul-'Umran." Online (Zoom), 21 November 2024.
- . "Lahirnya Akar Geneologi Santri : Antara Pendidikan Pesantren Tradisional dan Modern." Oktober 2024.
- Nainggolan, Rahmanita Mawwadah. "Perbandingan Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.
- Nulhakim, Lukman. "Konsep Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Madjid Sebuah Fenomenologi Agama." *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (t.t.): 256.
- Nuridin, Ahmad Ali. *Agama dan Politik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.
- Nurjaman, Ilham Muhammad, Samsudin Samsudin, dan Sulasman Sulasman. "Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional." *Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (t.t.): 66.
- Prayetno, Budi. "Konsep Sekularisasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid." *Sulesana* 1, no. 2 (2017): 3.
- Putra, Okrisal Eka. "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 186.
- . "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 186.
- R, Abd. Latief. "NURCHOLISH MADJID (Kajian Historis tentang Perannya Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, t.t.
- . *Membaca Nurcholish Madjid : Islam dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Rahman, Muhammad Taufiq, dan Asep Saeful Mimbar. "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid." *Fikri : Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 386.

- Ramadhan, Khairul. "Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila ditinjau Dari Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Rasyidin, Yusafri. "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Agama dan Negara." *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020).
- Repantu, Candiki, dan Salamuddin Salamuddin. *Teokrasi Kontemporer : Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Ripaldy, Muh. "Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Roem, Mohamad. *Bunga Rampai Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Rofiqoh, Dewi. "Dinamika Perkembangan Matematika Dari Abad Pertengahan Hingga Ke Gerakan Renaissance dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Matematika di Sekolah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Rustamana, H. Agus, Putry Maharani Adillah, dan Zamin Zatu. "1998 Reform Movement." *Indonesian Journal Of Applied And Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 6 (t.t.): 556.
- Saleh, Ali Ismail, dan Wisnaeni Fifiana. "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 239.
- Santoso, M.H Budi. *Darul Islam : Pemberontakan di Jawa Barat*. 1 ed. Bandung: Pustaka Jaya, 2013.
- Siregar, Insan Fahmi. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)." *Thaqaifiyyat* 14, no. 1 (2013): 93.
- Sirry, Mun'im. *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. 1 ed. Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Sonjaya, Adang. "Relasi Agama dan Politik di Indonesia." *Jurnal CIC Lembaga dan Konsultasi Sosial* 5, no. 1 (2023): 25.
- Sumantri, Rifki Ahda. "Pemikiran dan Pembaharuan Islam Menurut Perspektif Nurcholish Madjid di Indonesia." *An-Nidzam* 6, no. 1 (t.t.): 27.
- Surahman, Susilo. "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid." *Jurnal Dakwah* 11, no. 2 (2010): 132.
- Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid - Mohamad Roem*. 2 ed. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Tidak Ada Negara Islam : Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Tsoraya, Nurul Dwi, Masduki Asbari, dan Gunawan Santoso. "Pancasila dan Agama : Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 16.
- Usman, Ismail. "Sarekat Islam (SI) : Gerakan Pembaruan Politik Islam." *JURNAL POTRET : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (t.t.): 47.

- Wahid, M. Abduh. "Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 147.
- Watt, William Montgomery. *Muhammad : Melihat Sang Nabi Sebagai Negarawan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Beunebi Cipta, 1987.
- . *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Beunebi Cipta, 1987.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyyah II*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Yusuf, Muhammad, dan Jun Mawalidin. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia." *Politica : Jurnal Hukum tata negara dan politik Islam* 9, no. 1 (t.t.): 75.
- Yusuf, Nugraheni Setiawan. "Mengenang Sejarah, Merefleksikan Penyertaan Allah : Sebuah Rancangan Ibadah Peringatan Terbebasnya Gereja Toraja Dari Kekuasaan DI/TII." *Jurnal Abdiel* 6, no. 1 (2022): 22.